



w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

06



PENGUATAN REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI



MINI ATM

MINI ATM
MINI ATM
MINI ATM
MINI ATM
MINI ATM

MUDAH, FLEKSIBEL, DAN TRANSPARAN



**BEA CUKAI DAN BANK MANDIRI SEPAKATI KERJA SAMA CIPTAKAN
KEMUDAHAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA**

Pada tahap awal, Bank Mandiri akan menempatkan 56 mini ATM dan mesin EDC di Kantor-Kantor Bea Cukai, Pos Lintas Batas Negara, Kantor Pos, serta Bandara dan Pelabuhan telah ditunjuk oleh Bea Cukai.

Bank Mandiri juga menambahkan fitur pembayaran di bidang kepabeanan, cukai, serta pajak ekspor dan impor pada alat pembayaran non tunai Mandiri.

DARI REDAKSI

Tidak terasa tahun 2017 telah hampir mencapai pertengahan tahun. Di edisi ke-lima kali ini, redaksi akan membahas terkait penguatan reformasi yang sedang diusung oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Seperti yang telah diketahui, di akhir Desember 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani telah membentuk Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai untuk menjadikan institusi Bea Cukai semakin dapat diandalkan dan dapat meraih kepercayaan publik.

Di edisi ini juga, redaksi akan mengulas tentang daerah Donggala, sebuah daerah di Sulawesi tempat di mana dulu pernah ada kantor Bea Cukai di sana. Keberadaan kantor Bea Cukai Donggala sempat mewarnai perjuangan politik pergerakan kemerdekaan saat terjadi penolakan pendudukan Belanda yang diboncengi Sekutu/NICA, barisan Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) melakukan penurunan bendera merah-putih-biru milik pemerintah Hindia Belanda di halaman kantor pada tanggal 21 November 1945. Meski saat ini sudah tidak lagi ada, namun sisa-sisa sejarahnya masih dapat ditemukan di sana. Selengkapnya dapat anda baca di rubrik Sejarah.

Pada rubrik sisi pegawai kali ini, redaksi akan mengangkat kisah seorang pegawai Bea Cukai muda dari Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Pantoloan, yaitu Parikesit Jati Kusumo. Mungkin di awal dirinya bergabung dengan Bea Cukai, tak pernah terbersit dalam pikirannya untuk bekerja di lingkungan Patroli Laut Bea Cukai. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang baru dan memiliki tantangan tersendiri bagi dirinya.

Di rubrik feature kali ini, redaksi akan mengulas tata cara impor obat-obatan secara khusus. Seperti yang diketahui impor obat-obatan tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak. Para pengimpor harus memiliki izin *Special Access Scheme*. Izin ini dikeluarkan untuk mengimpor obat-obatan yang sulit didapatkan di Indonesia dan dibutuhkan segera, terutama bagi pasien penyakit tertentu. Selengkapnya dapat anda baca di rubrik Feature.

Tak ketinggalan di rubrik Hobi dan Komunitas, Agus Saputra akan menceritakan kepada para pembaca pengalamannya berkeliling dunia dan menuliskannya di blog. Dirinya tergabung dalam komunitas *backpacker* Kepulauan Riau. Jangan sampai kelewatan untuk membaca tulisan pengalaman keliling dunia Agus Saputra.

Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi anda untuk majalah WBC dapat berupa foto, karya sastra baik puisi, komik, cerita pendek, ataupun cerita bersambung. Kirimkan karyamu ke wartabeacukai@gmail.com

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi

Deni Surjantoro

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan wartabeacukai@gmail.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subjek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 Ext. 820-821-822
E-mail: wartabeacukai@gmail.com dan majalah.wbc@customs.go.id
Follow: [@Warta_BeaCukai](https://www.facebook.com/Warta_BeaCukai) [WartaBeaCukai](https://www.facebook.com/WartaBeaCukai)

Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LL.M.

**PENASEHAT
SEKRETARIS DIJEN BEA DAN CUKAI**
Dr. Kushari Suprianto, M.M., M.E.

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
Robi Toni, S.E., M.M.

DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN
Ir. Rahmat Subagio, M.A.

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A.

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL
Hendra Prasmono, S.H., M.IH

Plt. DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwi Teguh Wibowo, S.E.

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
Ir. Harry Mulya, M.Si.

**DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN
STRATEGIS**
Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si.

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI**
Dwijo Muryono

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI**
Dwi Teguh Wibowo, S.E.

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN
DAN CUKAI**
M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA
DAN CUKAI**
Ir. Agus Hermawan, MA

**PENGARAH
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN
ANTAR LEMBAGA**
DR. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA

**PEMIMPIN REDAKSI
KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI**
Deni Surjantoro

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

REDAKTUR
Isro'ah Laeli Rahmawati, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Zulfaturrahmi, Rezky Ramadhani, Septian Dawang Kristanto, Rian Effendi, Nur Iman, Rio

FOTOGRAFER
M. Faishal Hafizh, Jodie Umbara, M. Khamil Hamid, Nurcholis Efendi, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira

REPORTER
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya

SEKRETARIAT
Kartika, Nur Hani Rahmawati, Mustamiludin, Dadan Heriyana, Rudi Andrian

Daftar Isi

04 EVENT



- 04 Resmikan Pos Lintas Batas di Jayapura, Presiden Ingin Tumbuhkan Zona Ekonomi Baru



- 04 Bea Cukai Sintete Hibahkan Beras dan Gula Pada Warga Sambas



- 05 Membaca Bersama Bea Cukai Jambi



- 05 Sinergi Bea Cukai, Polri, PPATK , Ditjen Pajak, dan Itjen Kemenkeu Bongkar Penyelundupan Tekstil



- 06 Patroli Laut Bea Cukai Amankan 63,8 Ton Amonium Nitrat dari Laut Bali



- 07 Bea Cukai Sidoarjo Dorong IKM Tas Koper Tanggulangi untuk Meningkatkan Ekspor

08 PROFIL KANTOR



- 08 Pemekaran Kanwil DJBC MPPB Mendukung Salah Satu Program Nawacita

15 PERATURAN

- 15 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 05/BC/2017

16 LAPORAN UTAMA



- 16 Reformasi Bea Cukai: Upaya Meraih Kepercayaan Publik Melalui Penguatan Budaya Organisasi dan Peningkatan Integritas



- 17 Customs and Excise Reform: Gaining Public Trust Through Organizational Culture Reinforcement and Integrity Improvement

30 WAWANCARA



- 30 Mewujudkan Bea Cukai yang Kredibel, Kuat dan Akuntabel

33 FEATURE



- 33 Impor Obat-Obatan Khusus

38 SISI PEGAWAI



- 38 Parikesit Jati Kusumo Kekuatan Tertinggi Sejatinya Bunga

40.....RUANG KESEHATAN



- 40 Ketika Gigi Tumbuh Berjejal

41.....HOBI DAN KOMUNITAS



- 41 Menulis Perjalanan Hidup di Blog

48.....BERBAGI PENGETAHUAN



- 48 Ini Stetoskop Cetak 3D untuk Gaza

50.....OPINI

- 50 Quantifying the Impact of Trade Facilitation in Indonesia

54.....SEJARAH



- 54 Donggala, Sisa Kejayaan Masa Lampau

57.....BEA CUKAI MENJAWAB

- 57 Pembebasan Bea Masuk Buku Ilmu Pengetahuan

58.....INFOGRAFIS

60.....GALERI FOTO



64.....TRAVEL NOTES



- 64 Kampung Wisata Jodipan: Nikmati Mural di Pemukiman Padat Tengah Kota Malang

70.....RAGAM

- 70 Garda Kulon dan Kelinci Pemasok Wortel Ilegal

72.....KICAU



RESMIKAN POS LINTAS BATAS DI JAYAPURA, PRESIDEN INGIN TUMBUHKAN ZONA EKONOMI BARU

JAYAPURA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakhiri kunjungan Lintas Nusantara di Papua. Kunjungan kerja yang dilaksanakan dalam lima hari tersebut dimulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, menuju ke Kalimantan Selatan, Maluku Utara, hingga diakhiri di Papua. Dalam kunjungannya ke Papua, pada Selasa (09/05), Presiden Joko Widodo kembali meresmikan satu lagi Pos Lintas Batas Negara yang terletak di Skow, Jayapura. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan di daerah perbatasan harus terus digencarkan. “Perbatasan merupakan pintu utama Indonesia dengan negara lain, jangan sampai pembangunan perbatasan malah tertinggal,” ungkapnya. Presiden Joko Widodo turut menambahkan bahwa dengan modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow, diharapkan akan menumbuhkan zona-zona ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Berada di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi turut memberikan penjelasan terkait kinerja Bea Cukai di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ini. Bea Cukai Jayapura telah mengadopsi sistem-sistem otomasi kartu identitas lintas batas yang sebelumnya telah diterapkan di Entikong dan Nanga Badau. “Dengan otomasi sistem ini tentunya akan mempercepat pelayanan dan meningkatkan pengawasan terhadap para pelintas batas,” papar Heru. Patut diketahui, Bea Cukai Jayapura telah mencapai target penerimaan tahun 2017 hingga Mei ini. “Dengan modernisasi PLBN, diharapkan dapat semakin mempercepat pelayanan yang nantinya akan berimbas terhadap terkumpulnya penerimaan negara,” pungkasnya.



BEA CUKAI SINTETE HIBAHKAN BERAS DAN GULA PADA WARGA SAMBAS

SAMBAS – Barang-barang kebutuhan pokok para pelintas batas yang dikategorikan sebagai barang ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diamankan oleh petugas Bea Cukai. Barang-barang tersebut, menurut Kepala Kantor Bea Cukai Sintete, Achmat Wahyudi, dipertimbangkan pemanfaatannya agar dapat dihibahkan untuk kepentingan sosial. Seperti yang terjadi pada Selasa (09/05), Bea Cukai Sintete menghibahkan barang milik negara eks kepabeanaan yang berasal dari beberapa penindakan petugas Bea Cukai, berupa 700 kg beras, 1.932 kg gula, 64 liter minyak goreng dan 10 kg tepung terigu asal Malaysia, kepada warga di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. “Untuk meringankan beban kehidupan masyarakat, dan dengan terbitnya surat persetujuan dari Kepala KPKNL Singkawang a.n Menteri Keuangan, hari ini kami hibahkan barang-barang tersebut kepada masyarakat kurang mampu di desa Sebunga dan desa Kaliau, melalui Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas,” ujarnya.



MEMBACA BERSAMA BEA CUKAI JAMBI

JAMBI – Buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Ungkapan inilah yang mendorong Bea Cukai Jambi untuk mengadakan program literasi bertajuk 1000 Buku: Membaca Bersama Bea Cukai Jambi. Program ini merupakan bentuk kepedulian Bea Cukai Jambi terhadap dunia pendidikan dengan mencoba menumbuhkan minat baca bagi anak-anak Indonesia. Sesuai dengan tujuannya, program ini menysasar beberapa sekolah dasar di wilayah Jambi, yaitu SD Negeri 09 Kabupaten Muaro Jambi, SD Negeri 145/V Sri Menanti Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan SD Negeri 44/IV Tanjung Johor. Tidak hanya membagikan buku bacaan kepada perpustakaan sekolah, Bea Cukai juga mengadakan kelas inspirasi dengan tema cita-cita. Dengan adanya kelas inspirasi, diharapkan setiap siswa memiliki cita-cita dan selalu semangat meraihnya, bahkan setiap siswa didorong untuk menuliskan cita-cita mereka dan menggantungkannya pada “pohon cita-cita” yang telah disiapkan. “Melalui program ini, kita berharap para penerus bangsa ini dapat tumbuh cerdas dan berkarakter sehingga mampu mengejar cita-citanya sejak dini”, ungkap kepala Kantor Bea Cukai Jambi Priyono Triatmojo mengomentari kegiatan yang dilaksanakannya.



SINERGI BEA CUKAI, POLRI, PPATK, DITJEN PAJAK, DAN ITJEN KEMENKEU BONGKAR PENYELUNDUPAN TEKSTIL

JAKARTA – Bea Cukai, bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, berhasil membongkar pelanggaran ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilakukan oleh PT SPL yang berlokasi di Bandung. PT SPL melakukan ekspor barang dalam PEB dengan pemberitahuan 4.038 roll kain. Pada Rabu (29/06), berdasarkan informasi dari Bea Cukai Jawa Barat dan hasil analisis intelijen Bea Cukai Tanjung Priok, dilakukan penindakan dengan hasil pemeriksaan hanya kedatangan 583 roll kain. Dari hasil penindakan ini, dilakukan audit investigasi oleh Bea Cukai dan dilakukan pengembangan bekerja sama dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.



PATROLI LAUT BEA CUKAI AMANKAN 63,8 TON AMONIUM NITRAT DARI LAUT BALI

DENPASAR – Bea Cukai menggelar Operasi Patroli Laut Jaring Wallacea, yang dimulai pada Rabu (10/05), dan merupakan upaya nyata Bea Cukai dalam memperketat pengawasan terhadap upaya penyelundupan barang ekspor, barang yang terkait terorisme, serta pelanggaran yang dapat merusak sumber daya alam. Wilayah pengawasan Patroli Laut Jaring Wallacea mencakup perairan Kalimantan Bagian Timur, Sulawesi, Halmahera, Banda, Bali, Arafura, hingga perairan utara Papua. Dalam operasi ini, Bea Cukai menerjunkan enam kapal patroli dan dua kapal cadangan. Operasi ini berhasil menegah sebuah kapal kayu yang kedapatan membawa ammonium nitrate di perairan Laut Bali. Bahan baku peledak seberat 63,8 ton tersebut terbagi

menjadi 2.552 karung dengan berat masing-masing 25 kilogram. Saat tim patroli laut melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, awak kapal dan nahkoda berinisial JDN tidak dapat menunjukkan dokumen sah, berupa manifest, atas amonium nitrat tersebut. Saat ini barang bukti berupa amonium nitrat telah dibongkar, dan ditiptikan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Denpasar. Bea Cukai juga terus menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelidiki kasus ini terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sinergitas antar instansi yang sudah dilaksanakan ini menunjukkan hasil yang konkrit dan positif untuk menangani kasus serupa dan memberantasnya mulai dari hulu hingga ke hilir.



BEA CUKAI SIDOARJO DORONG IKM TAS KOPER TANGGULANGIN UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR

SIDOARJO – Tanggulangin sudah lama dikenal sebagai pusat industri tas dan koper. Namun, masuknya tas impor dan beredarnya tas produksi massal yang harganya lebih murah, membuat tas dan koper Tanggulangin kehilangan peminatnya. Melihat fenomena ini, Bea Cukai Sidoarjo perlu memberikan dukungan dan asistensi demi berkembangnya para perajin di Tanggulangin. Melalui fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah atau dikenal sebagai KITE-IKM yang diberikan Bea Cukai, para perajin yang melakukan ekspor akan mendapatkan

kemudahan dalam importasi bahan baku. “Bagi para pengrajin yang melakukan ekspor akan mendapatkan kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPh Impor,” jelas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Moh. Adhar dalam acara sosialisasi tentang KITE-IKM di Pendopo balai Desa Kedensari Tanggulangin (10/5). Menurut ketua Koperasi Industri Tas Koper (INTAKO) Ainur Rofiq, jumlah perajin tas dan koper skala kecil dan menengah yang ada di Tanggulangin berjumlah hampir 300 perusahaan yang sebagian besar tergabung dalam Koperasi INTAKO. “Dari jumlah tersebut, sekitar 20 perusahaan sudah melakukan ekspor ke mancanegara, baik melalui pembelian langsung maupun pengiriman melalui ekspedisi,” terangnya.



PEMEKARAN KANWIL DJBC MPPB MENDUKUNG SALAH SATU PROGRAM NAWACITA

Terdapat beberapa perubahan dalam penataan organisasi instansi vertikal DJBC sesuai dengan PMK 188/PMK.01/2016, salah satu perubahannya adalah adanya pemekaran Kantor Wilayah DJBC sehingga berdampak pada penambahan 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC dan 1 (satu) Kantor Wilayah DJBC Khusus yaitu Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat, Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan dan Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara serta Kantor Wilayah Khusus Papua.

Khususnya di Kanwil Khusus Papua, mengenai hal tersebut, Kepala Kanwil Maluku, Papua dan Papua Barat (MPPB), **Cerah Bangun**, menjelaskan, pemekaran wilayah itu selaras dengan rencana kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka implementasi penataan organisasi instansi vertikal DJBC. Dalam hal ini Kanwil MPPB telah melaksanakan berbagai langkah persiapan yang dimulai dengan pembentukan Tim Asistensi Persiapan Pembentukan Kantor Baru di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC MPPB Dalam Rangka Implementasi PMK Nomor 188/PMK.01/2016 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC MPPB Nomor KEP-03/WBC.16/2017. Tim ini memiliki 3 Sub Tim yang masing-masing terbagi dan

fokus kepada: penyiapan pembentukan Kanwil khusus Papua; penyiapan KPPBC yang mengalami perubahan tipologi (ada 5 Kantor); dan penyiapan KPPBC yang mengalami likuidasi atau melebur dengan KPPBC yang lain (ada 3 Kantor).

Sampai dengan saat ini, persiapan yang telah dilaksanakan antara lain :

- ❖ Terselesaikannya penetapan lokasi dan gedung/bangunan kantor yang akan digunakan.
- ❖ Terselesaikannya penyusunan rencana *lay-out* kantor yang disesuaikan dengan tipologi kantor yang baru.
- ❖ Terselesaikannya penyiapan data aset BMN dalam rangka proses alih status.
- ❖ Penyiapan standardisasi sarana dan prasarana fisik kantor yang

disesuaikan dengan tipologi kantor baru, seperti: identitas kantor (papan nama kantor dan warna cat bangunan kantor).

- ❖ Identifikasi kebutuhan SDM dan penyusunan rekomendasi pemenuhannya untuk ditempatkan di Kanwil Khusus Papua atau KPPBC yang mengalami perubahan tipologi.
- ❖ Persiapan acara peluncuran kantor baru (*launching*) dengan berkoordinasi ke Kantor Pusat DJBC, jajaran Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait di daerah.

“Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi salah satu latar belakang dari pemekaran Kanwil MPPB adalah DJBC ingin turut mendukung salah satu

kelestarian sumber daya alam yang ada di wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat,” ungkap Cerah.

“Karena itu, peran utama kami di Kanwil MPPB dalam rangka persiapan pemekaran Kanwil dimaksud adalah melaksanakan fungsi koordinasi baik secara internal di Kantor Wilayah dan KPPBC maupun dengan Kantor Pusat DJBC termasuk juga koordinasi yang perlu dilakukan dengan jajaran di Pemerintahan Daerah maupun instansi teknis terkait,” ungkapnya lagi.

Di samping itu, lanjutnya, Kanwil MPPB juga melaksanakan peran memberikan asistensi terkait tahapan-tahapan atau

sehingga langkah antisipasi dapat segera dirumuskan dan dijalankan.

Untuk memetakan dan memitigasi proses bisnis dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lintas sektor agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai Kanwil Maluku dan Kanwilsus Papua, maka beberapa masukan disampaikan tim internal kepada Tim Asistensi. Beberapa masukan yang telah disampaikan antara lain: masukan mengenai lokasi-lokasi yang menjadi pusat ekonomi atau bisnis yang terkait dengan kegiatan ekspor/ impor; masukan tentang potensi ekonomi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam perluasan pemberian fasilitas di



Program Nawacita yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi maksud dari pemekaran Kanwil ini adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi, memberikan perlindungan kepada masyarakat misalnya dari Narkotika dan barang berbahaya lainnya, serta menjaga

langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masing-masing KPPBC sehingga proses persiapan dapat berjalan dengan lancar dan target waktu implementasi dapat terpenuhi. Diharapkan dengan menjalankan peran tersebut, Kanwil MPPB juga dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul saat implementasi

bidang Kepabeanaan (PLB, KB, dan KEK); masukan tentang karakteristik sosial di wilayah Maluku dan Papua (*issue* konflik sosial; sulitnya melakukan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan di wilayah Papua terkait kewajiban terhadap hak adat; dst.); masukan mengenai potensi-potensi risiko yang akan dihadapi khususnya di wilayah Papua; serta masukan terkait dengan adanya



■ Cerah Bangun. Kami optimis adanya penambahan Kanwil baru yaitu Kanwil Khusus Papua maka masalah *span of control* yang terlalu luas tadi bisa diminimalisir

SDM lokal putra daerah yang berdasarkan penilaian kami, yang bersangkutan mampu menjadi motivator atau motor penggerak dalam mendukung kegiatan pelayanan ataupun pengawasan kepebeanaan dan cukai di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat.

Span of Control Yang Terlalu Luas

Sebelumnya, wilayah kerja Kanwil MPPB meliputi 4 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

atau seluas 494.956,85 KM² (kurang lebih setara dengan 24,65% Wilayah Indonesia). Untuk menunjang tugas dan fungsi, Kanwil MPPB harus melaksanakan fungsi koordinasi kepada cukup banyak sektor antara lain 2 Kodam, 4 Polda dan 36 Polres, 2 Kanwil Ditjen Pajak, 4 Kejaksaan Tinggi dan 34 Kejaksaan Negeri serta 4 Kanwil Perbendaharaan. Dengan wilayah yang sangat luas maka *span of control* yang dimiliki oleh Kanwil MPPB begitu luas karena harus membawahi 13 KPPBC

dan 1 PSO sehingga dirasakan menjadi kurang efektif dan efisien.

Tidak hanya lingkup Kanwil, KPPBC yang berada di bawah Kanwil MPPB pun memiliki wilayah kerja yang luas yang tidak sebanding dengan level Kantor maupun jumlah SDM yang dimiliki. Sebagai contoh KPPBC Tual, sebelumnya berstatus sebagai KPPBC Tipe Pratama yang kemudian naik status menjadi KPPBC Tipe Madya, memiliki wilayah kerja hingga ke Saumlaki yang berbatasan dengan Australia.



Luasnya wilayah ini tentu berbanding lurus dengan beban pengawasan yang harus dilakukan khususnya pengawasan sumber daya alam karena telah diketahui bersama bahwa wilayah laut di Maluku memiliki kandungan sumber daya perikanan yang sangat besar. Luasnya cakupan wilayah ini menjadi semakin sulit dijangkau apabila melihat kondisi geografis wilayah yang berupa pegunungan dan lautan. Wilayah yang sangat luas ditambah dengan adanya perbatasan 5 Negara

tidak hanya lingkup Kanwil, KPPBC yang berada di bawah Kanwil MPPB pun memiliki wilayah kerja yang luas yang tidak sebanding dengan level Kantor maupun jumlah SDM yang dimiliki. Sebagai contoh KPPBC Tual, sebelumnya berstatus sebagai KPPBC Tipe Pratama yang kemudian naik status menjadi KPPBC Tipe Madya, memiliki wilayah kerja hingga ke Saumlaki yang berbatasan dengan Australia.

tetangga (Papua Nugini, Timor Leste, Australia, Palau dan Philipina) tentu memberikan tantangan pengawasan yang cukup besar.

“Kami optimis adanya penambahan Kanwil baru yaitu Kanwil Khusus Papua maka masalah *span of control* yang terlalu luas tadi bisa diminimalisir, fungsi Kanwil dalam pembinaan KPPBC yang berada di bawahnya dapat lebih optimal, pengawasan sumber daya alam juga dapat lebih optimal karena ditunjang oleh adanya pemekaran kantor ataupun kenaikan level kantor. Upaya peningkatan efektivitas pengawasan melalui pemetaan potensi penyalahgunaan di bidang kepabeanaan seperti penyelundupan atau isu masuknya NPP serta peredaran BKC yang tidak memenuhi ketentuan khususnya di wilayah Papua, dapat dilaksanakan dengan lebih baik,” ungkap Cerah.

“Di sisi lain, kami juga melihat koordinasi yang harus dijalankan dengan

pihak eksternal khususnya dengan jajaran Muspida di daerah maupun dengan aparat penegak hukum lain dapat berjalan secara lebih optimal dan lebih mudah. Kesemua capaian tersebut nantinya diharapkan dapat berakibat positif kepada peningkatan ekonomi daerah sehingga benar-benar dapat mendukung pencapaian tujuan program Nawacita yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ungkapnya lagi yang menyatakan setelah penerapan PMK Nomor 188/PMK.01/2016 maka Kanwil MPPB akan berubah nama menjadi Kanwil Maluku dengan cakupan wilayah meliputi provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara, yang mengkoordinasikan 3 KPPBC Tipe Madya yaitu KPPBC TMP Ternate, KPPBC TMP Ambon dan KPPBC TMP Tual. KPPBC TMP Tual merupakan kantor yang mengalami kenaikan tipologi dari sebelumnya berstatus sebagai KPPBC Pratama.

Kanwilus Papua, Peran Pengawasan Lebih Dominan

Untuk Kanwil Khusus Papua, peran pengawasan laut akan lebih dominan yang meliputi perairan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat seperti Laut Maluku, Laut Banda, Laut Seram, Laut Aru dan Laut Arafuru yang menjadi salah satu potensi titik rawan penyalahgunaan di bidang Kepabeanaan. Peran inilah yang memang akan menjadi fokus Kanwil Khusus Papua. Namun selain itu, fungsi dari pemberian fasilitas perdagangan dan industri serta optimalisasi penerimaan juga menjadi perhatian tambahan mengingat wilayah Papua memiliki aset SDA yang cukup melimpah.

Sementara untuk Kanwil Maluku nantinya akan menjalankan fungsi secara seimbang baik fungsi fasilitasi perdagangan maupun industri, fungsi menjaga perbatasan dan melindungi





masyarakat (pengawasan), maupun fungsi optimalisasi penerimaan.

“Secara keseluruhan, pengawasan laut menjadi tantangan tersendiri bagi kami mengingat wilayahnya yang sangat luas sementara armada dan sarana patroli kami sangat terbatas. Namun hal itu tentu tidak mengurangi tugas kami semua di sini, di wilayah Timur Indonesia, untuk terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Cerah.

Selama ini, lanjut Cerah, penyumbang terbesar penerimaan negara di Kanwil MPPB berasal dari Bea Keluar yang diperoleh dari proses ekspor-tasi oleh PT. Freeport Indonesia yang berlokasi di Timika, Papua. Namun demikian, kami telah melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber penerimaan lain selain Bea Keluar oleh PT. FI terutama yang berada di wilayah Maluku serta Maluku Utara, dan yang menjadi perhatian saat ini adalah

industri pertambangan nikel dan emas serta pembangunan smelter di wilayah Maluku Utara yang ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu potensi penerimaan bagi Kanwil Maluku.

Menurut MP3EI, provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki 8 Kawasan Perhatian Investasi mulai dari Morotai sampai dengan Saumlaki. Sehingga kami masih optimis masih banyak potensi penerimaan yang dapat digali. Sehingga dapat ikut berperan dalam rangka mewujudkan Bea dan Cukai yang makin baik.

(ariessuryantini)

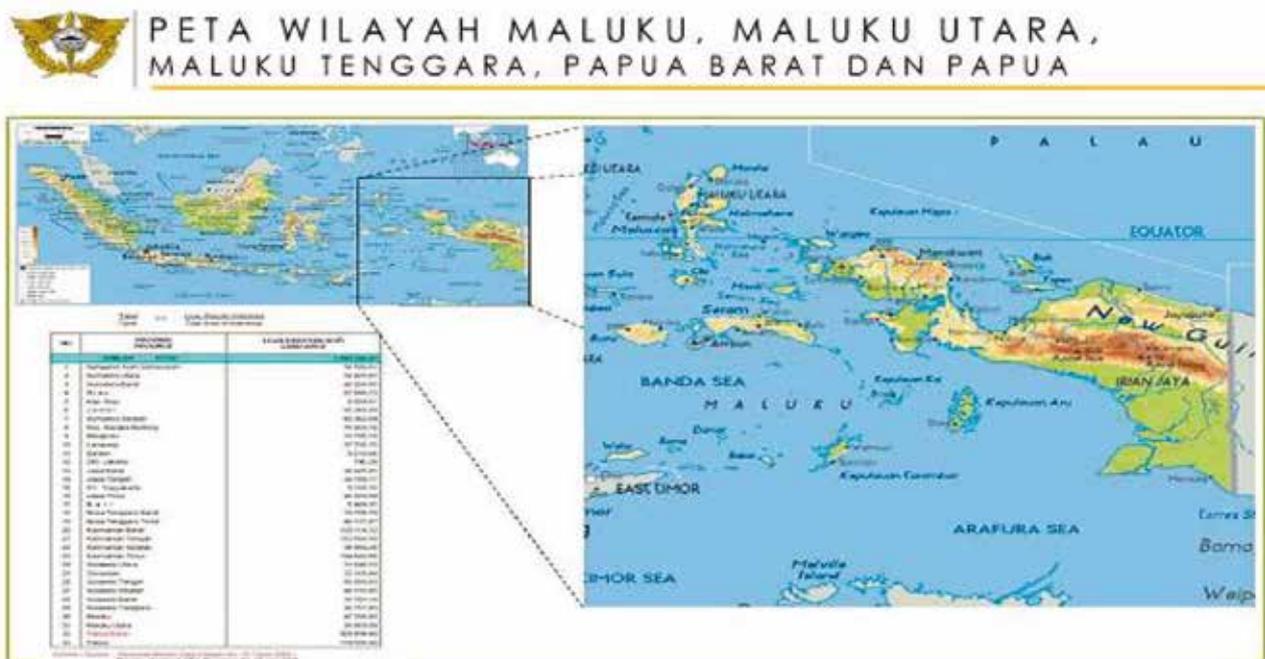


1. Potensi ekonomi



Potensi Penerimaan. provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki 8 Kawasan Perhatian Investasi mulai dari Morotai sampai dengan Saumlaki. Sehingga kami masih optimis masih banyak potensi penerimaan yang dapat digali.

2. Wilayah Kanwil MPPB



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 05/BC/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam PDJ dimaksud, antara lain:

1. Latar belakang diterbitkannya PDJ tersebut, antara lain: Mengingat PDJ yang mengatur tata cara pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebelumnya (PER-04/BC/2016) telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016, sehingga perlu diterbitkan PDJ pengganti untuk memperlancar pelayanan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu tahun anggaran 2017 dan tahun-tahun selanjutnya.
2. Tujuan Penyusunan PDJ dimaksud, yaitu: memberikan payung hukum untuk memperlancar pelayanan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu tahun anggaran 2017 dan tahun-tahun selanjutnya.
3. Hal-hal pokok yang diatur dalam PDJ tersebut, antara lain :
 - a. tata cara pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
 - b. tata cara dan persyaratan dokumen permohonan dalam rangka pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
 - c. penyelesaian administrasi mengenai pelaksanaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
 - d. pelaporan realisasi impor dan pertanggungjawaban pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu; dan
 - e. mengatur mengenai tata cara pengadministrasian, penatausahaan dan dokumentasi;



Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai yang mulai dicanangkan akhir tahun lalu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyelesaikan sebelas program. Program tersebut merupakan *quick wins* atau program unggulan penguatan reformasi yang menyorot aspek-aspek yang penting untuk dibenahi, antara lain integritas pegawai, sinergi dengan instansi lain, kepatuhan pengguna jasa, serta otomasi sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan.



REFORMASI BEA CUKAI: UPAYA MERAHAI KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PENGUATAN BUDAYA ORGANISASI DAN PENINGKATAN INTEGRITAS

Program penguatan reformasi merupakan sebuah rangkaian. Ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai pada tahun 1995 yang memulai sejarah panjang Bea Cukai dalam melakukan perubahan. Berlanjut di tahun 2002, perubahan mendasar dilaksanakan pada area tata laksana, pengawasan dan pelayanan publik, serta mulai menyentuh aspek kode etik dan perilaku. Kemudian, di tahun 2006, perubahan mulai dilakukan pada area organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi melalui pembentukan kantor modern. Di tahun 2007, melalui paket reformasi birokrasi, area akuntabilitas mendapat perhatian penting melalui program manajemen berbasis kinerja. Selanjutnya, pada tahun 2010, melalui paket reformasi lanjutan, perubahan pada area organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik terus dilaksanakan dengan juga merumuskan tata nilai dan budaya kerja. Bahkan, sejak tahun 2014 bersama dengan digulirkannya program transformasi kelembagaan, Bea Cukai terus melakukan perubahan pada semua area reformasi birokrasi yang membawa Bea Cukai berada pada posisi strategis saat ini.

Reformasi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu sejak tahun 1995 hingga tahun 2016 tersebut cenderung lebih menekankan aspek perubahan tata laksana (proses bisnis). Setidaknya, lebih dari lima puluh program perubahan tata laksana telah digulirkan yang sebagian besar menitikberatkan pada otomasi dan simplifikasi layanan. Berbeda dengan program-program reformasi sebelumnya, penguatan

Customs and Excise Reform Reinforcement Program, which has been started in 2016, has been completing 11 programs. Those programs are known as quick wins, or front-runner reinforcement programs which target the important field to reform such as the integrity, synergy between Directorate General of Customs and Excise (DGCE) with other institutes, customs stakeholder compliance, and the automation of system and procedure of control and service.

CUSTOMS AND EXCISE REFORM: GAINING PUBLIC TRUST THROUGH ORGANIZATIONAL CULTURE REINFORCEMENT AND INTEGRITY IM- PROVEMENT

Customs and Excise Reform Reinforcement Program is a long sequence. Law of Republic of Indonesia Number 10 Year 1995 on The Customs and Excise starts the long history of the reform. The reform continues, where in 2002 the fundamental changes were conducted in the field of business process, public service, also aimed to the refinement of the codes of ethics. In 2006, the reform were aimed at the organization area, human resources, and organizational culture through the establishment of modern offices. In 2007, through the policy package of bureaucracy reform, accountability was also noticed by the establishment of performance-based management program. The next phase, in 2010, through the advanced policy package the reform continued to refine the organization area, business process, human resources, accountability, and public services along with the formulation of values and work culture. Even in 2014, together with the establishment of Customs and Excise Reform Reinforcement Program, DGCE has been continuously improving the bureaucracy process which puts DGCE in the strategic position nowadays.

The reform which has been going since 1995 until 2016 tend to concern about the business process improvements. At least, 50 business process improvement programs has been rolled out which mostly emphasize the service automation and simplification. Unlike the former reform programs, DGCE reform today is putting the organization culture and integrity reinforcement as the integral part of the reform, in addition to continuously improve in the areas such as human resources,



reformasi Bea Cukai saat ini menempatkan penguatan budaya organisasi dan peningkatan integritas sebagai “ruh” atau jiwa reformasi, di samping melaksanakan perbaikan berkelanjutan pada area sumber daya manusia, organisasi, infrastruktur, anggaran, proses bisnis, peraturan, dan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penguatan reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi Bea Cukai yang sesuai asas pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kepala Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea Cukai, **Ambang Priyonggo**, memaparkan bahwa Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang telah digulirkan sejak akhir Desember 2016 ini secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bea Cukai, serta mewujudkan institusi yang kredibel dan akuntabel. Dalam reformasi kali ini, Bea Cukai mengusung empat tema besar, yaitu penguatan integritas, budaya organisasi dan kelembagaan, optimalisasi penerimaan, penguatan fasilitasi, serta efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan.

“PRKC adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Bea Cukai. Hal ini berangkat dari ekspektasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat kepada kami. Ekspektasi tersebut berupa peningkatan peran dan fungsi Bea Cukai dalam melakukan pemberantasan perdagangan ilegal, serta tuntutan terutama yang terkait dengan pemberantasan dan praktik pungutan liar/korupsi. Harapannya, melalui reformasi ini, Bea Cukai dapat meraih kembali kepercayaan *public*,” ungkap Ambang.

Tuntutan masyarakat kepada Bea Cukai dalam menjalankan fungsi fasilitasi, perlindungan, dan penerimaan semakin meningkat. Tuntutan masyarakat dan tantangan yang masih perlu dijawab Bea Cukai meliputi beberapa hal antara lain:

- ❖ Tuntutan untuk terus melakukan upaya optimalisasi penerimaan negara sebagai modal pembangunan.
- ❖ Tuntutan untuk memberikan kemudahan ekspor-impor guna mempercepat arus logistik.

- ❖ Harapan untuk terus memberikan perlindungan dari serangan barang berbahaya seperti narkoba, penyakit, serta barang larangan lainnya.
- ❖ Perlindungan dari serangan komoditas yang dapat merugikan industri dalam negeri seperti baju bekas, pangan strategis, serta barang pembatasan lainnya.
- ❖ Katalisator pertumbuhan ekonomi negara melalui pemberian fasilitas kepabeanan yang berdampak pada meningkatnya selera investasi di Indonesia.
- ❖ Pemberian perlakuan yang adil kepada seluruh pengguna jasa kepabeanan.
- ❖ Serta upaya terus menerus dalam peningkatan integritas dan budaya pegawai Bea Cukai.

Selain isu dan tantangan yang bersifat teknis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula tantangan yang sejatinya merupakan tantangan fundamental yang dihadapi oleh Bea Cukai sebagai instansi publik di Indonesia, yaitu tantangan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya permasalahan integritas pegawai yang sering dikaitkan dengan tingkat korupsi dan budaya organisasi. Selain mengacu pada hasil survei yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga independen, baik nasional maupun internasional, tantangan terkait dengan integritas pegawai di Bea Cukai juga tergambar dari beberapa kasus riil di lapangan, dimana masih terdapat oknum pejabat/pegawai Bea Cukai yang menyalahgunakan kewenangannya dan terlibat dalam praktik korupsi. Selain integritas, budaya organisasi juga perlu mendapatkan perhatian serius mengingat keterkaitannya yang erat dengan aspek integritas sekaligus kinerja pegawai, baik secara individu maupun secara kolektif dalam organisasi.

Menurut Ambang, tuntutan dari masyarakat tersebut dimaknai positif oleh Bea Cukai sebagai bagian dari kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap Bea Cukai. Dijelaskan juga, reformasi kali ini berbeda dari reformasi-reformasi yang pernah dilakukan oleh Bea Cukai sebelumnya. Pada reformasi kali ini, Bea Cukai fokus pada area perubahan budaya organisasi, perubahan dalam wujud semangat dan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta peningkatan profesionalisme.

Konsep Reformasi

Konsepsi reformasi Bea Cukai beranjak dari pemahaman kondisi saat ini, serta tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Penguatan reformasi kali ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi Bea Cukai yang optimal, adil, dan terus menerus, dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat. Sebagai respon atas permasalahan/isu yang ada, dirumuskan penguatan reformasi kepabeanan dan cukai ke dalam program-program tematik berupa inisiatif-inisiatif strategis secara spesifik.

organizational, infrastructure, budgeting, business process, also the technology and information system and regulations. The reform reinforcement aims for raising public's trust on DGCE performance based on good governance.

Deputy Director of Strategic Planning and Transformation Management, Ambang Priyonggo, explained that the reform reinforcement program which has been started in the late December 2016, specifically aims for raising public's trust toward DGCE, as well as embodies the credible and accountable institution. On this reform reinforcement, DGCE carries four major themes and those are Integrity Reinforcement, Organizational and Institutional Culture, Revenue Optimization, Facilitation Reinforcement, and Service Efficiency and Control Efficacy.

"Customs and Excise Reform Reinforcement Program is a program initiated by DGCE. It comes from the expectation and public's demand which keep increasing toward DGCE. The demands are the improvements of DGCE role and function in combating illegal trade, as well as in combating the fraud and corruption. We hope that through the Reform Reinforcement Program we could regain public's trust," told Ambang.

Public's demand toward DGCE's function of trade facilitation, community protection, and revenue collection keep increasing. The demands are:

- ❖ The optimization of state revenue as the capital of development.
- ❖ Import-Export process efficiency to expedite logistics flow.
- ❖ Providing protection against narcotics, and other prohibited goods.
- ❖ Protection against the import commodity which is harmful to the domestic products such as used clothes, import food, and other restricted goods.
- ❖ Stimulating economic growth by providing customs facilities which will impact to the investment growth.
- ❖ Fair treatment to all stakeholders
- ❖ Continuous improvement on integrity and employee culture of DGCE.

Aside from the technical issues and challenges as formerly explained, there are also fundamental challenges for DGCE as a government institution, which is about human resources particularly the issue about employee integrity which is often related to the corruption and organization culture. According to the survey which is conducted by independent surveyors, the DGCE employee integrity still becomes a challenge toward reform, in which there are some individuals involved in fraud and corruption. In addition to integrity, organizational culture also needs concern as it has interconnection with integrity aspects and employee performance, individually or collectively.



According to Ambang, DGCE treats the public's demands positively as a part of concern and attention from community to DGCE. He also explained that today's reform is different from the previous reforms made by DGCE. This time, DGCE focuses on the reform of organizational culture, change in form of spirit, attitude, and behavior which go the same way according to the values of Ministry of Finance, and also professionalism improvement.

The Reform Concept

DGCE reform concept grows from the realization of today's condition and the purpose and results to be achieved. The reform reinforcement fundamentally aim for raising public's trust on the implementation of DGCE functions that is optimal, fair, and continuous which are based on the improvement of integrity and solid organizational culture. As the response of the current issues, the reform reinforcement is formulated into specific programs which are strategic initiatives. Those programs generally can be classified into a theme, such as integrity and culture and institutional, which becomes the central theme in the reform reinforcement program, also three big themes which depict DGCE main functions.

On this reform, DGCE has been establishing 19 specific programs which are called strategic initiatives which have significant, concrete, and direct impact toward stakeholders and community, both in terms of performance (facilitation, services, control, and revenue), and DGCE image which will be conducted from 2017 to 2020.

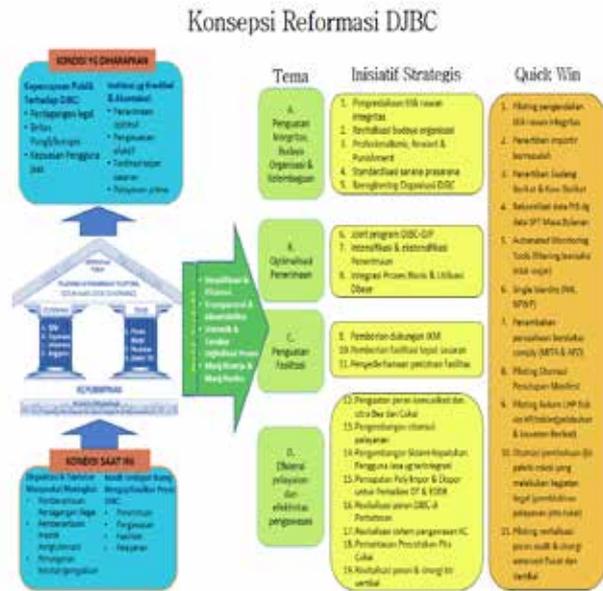
"From each themes, it will be classified into several breakthrough programs or usually called strategic initiatives. From the big four themes, it has been classified into 19 strategic initiatives that DGCE will achieve. Later, those programs will become a benchmark for the success of this reform," explained Ambang.

Program-program tersebut secara umum dapat diklasifikasi ke dalam sebuah tema terkait dengan integritas, budaya, dan kelembagaan yang menjadi tema sentral dalam penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai, serta tiga tema besar yang menggambarkan tugas utama Bea Cukai.

Dalam penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai, telah dirumuskan sembilan belas program tematik yang disebut dengan Inisiatif Strategis, yang mempunyai dampak signifikan, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders* dan masyarakat, baik dari sisi kinerja (fasilitasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan) maupun citra Bea Cukai yang direncanakan dilaksanakan selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

“Kemudian, masing-masing tema tersebut dirinci ke dalam beberapa program terobosan atau yang lazim disebut dengan Inisiatif Strategis. Dari empat tema besar program tersebut telah dirinci menjadi Sembilan belas inisiatif strategis yang ingin dicapai oleh Bea Cukai dan nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan program reformasi ini,” terang Ambang.

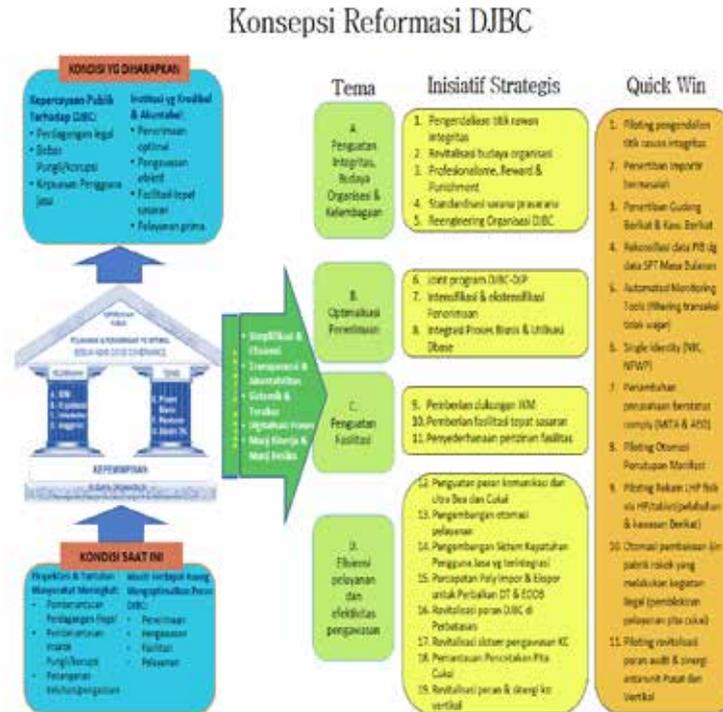
Penguatan penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Lebih jauh, apa yang ingin diwujudkan atau dicapai dari program penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai dapat diuraikan secara ringkas melalui matriks tujuan dan hasil/*outcome* dari inisiatif strategis di bawah ini:

No	Inisiatif Strategis	Tujuan	Outcome yang Diharapkan
1	Pengendalian titik rawan integritas	Mewujudkan pegawai Bea Cukai yang berintegritas dan profesional	1. Lingkungan yang mendukung penegakan integritas sehingga menekan tingkat kerawanan integritas 2. Pegawai menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak terdoda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik dan disiplin pegawai
2	Revitalisasi budaya organisasi	Terwujudnya perbaikan budaya organisasi guna mendukung reformasi birokrasi Bea Cukai	1. Terwujudnya persepsi yang sama mengenai nilai-nilai budaya organisasi di seluruh unit Bea Cukai 2. Perbaikan pola kerja, serta spirit dalam pelaksanaan tugas 3. Budaya organisasi tercermin dalam setiap perilaku seluruh pegawai Bea Cukai
3	Peningkatan profesionalisme pegawai Bea Cukai berbasis <i>reward and punishment</i>	Terwujudnya sumber daya manusia Bea Cukai yang profesional berbasis <i>reward and punishment</i>	1. Meningkatnya Profesionalisme pegawai Bea Cukai 2. Meningkatnya kinerja individu dan organisasi Bea Cukai 3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dapat menjadi jalur karir profesional bagi pegawai Bea Cukai 4. Terwujudnya pejabat yang profesional dalam pengelolaan anggaran
4	Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana	Terwujudnya modernisasi dan standardisasi sarana prasarana yang menunjang tugas dan fungsi serta memperkuat identitas Bea Cukai	1. Penggunaan anggaran sarana dan prasarana yang optimal 2. Terwujudnya sarana dan prasarana Bea Cukai yang modern dan terstandarisasi 3. Terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencerminkan kebutuhan riil sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bea Cukai
5	<i>Re-engineering</i> organisasi Bea Cukai	Terwujudnya organisasi Bea Cukai yang kondusif dan fit dalam menghadapi tuntutan <i>stakeholders</i>	1. Penyelundupan baik itu narkotika maupun barang lainnya dapat diminimalisir oleh Bea Cukai 2. Bea Cukai menjadi organisasi yang handal dan dapat dipercaya oleh masyarakat
6	Joint program Bea Cukai dan Ditjen Pajak (DJP)	Mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanaan dan/atau cukai	1. Turunnya upaya menghindari pembayaran pajak dan bea masuk/ bea keluar/cukai melalui importir berisiko tinggi 2. Peningkatan penerimaan negara 3. Optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak yang juga merupakan pengguna jasa kepabeanaan dan cukai secara bersama-sama oleh Bea Cukai dan DJP 4. Peningkatan daya saing industri dalam negeri

Chart of Customs and Excise Reform Reinforcement Program



Furthermore, DGCE goals on the Customs and Excise Reform Reinforcement Program are explained briefly in this strategic initiatives table below:

No	Strategic Initiatives	Goals	Expected Outcomes
1	Control of integrity vulnerability spot	Professional Customs Officers with Integrity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conducive environment for integrity enforcement so that it will reduce integrity vulnerability spot 2. Customs officers will conduct the duties according to ethic codes
2	Organizational Culture Revitalization	The improvement of organizational culture in order to support bureaucracy reform	<ol style="list-style-type: none"> 1. A single perception of organization values and culture in all DGCE units 2. Spirit and morale improvements on conducting duties 3. Organizational culture is reflected in customs officer behavior
3	Customs officers professionalism improvement based on Reward and Punishment	Professional customs officer based on Reward and Punishment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customs officer professionalism improvement 2. Performance improvement both for customs officers and DGCE 3. Functional Officers can be a viable option for professional career path for customs officer 4. Professional customs officer in managing government budget
4	Infrastructure modernization and standardization	Modern and standardized infrastructure which support DGCE duties and functions that also reinforce DGCE identity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimal use of infrastructure budget 2. Modern and standardize DGCE infrastructure 3. Efficient, effective, and optimal management of state-owned property yang which reflected actual usage of infrastructure utilization in supporting DGCE main duties and functions
5	DGCE organization re engineering	Conducive and strong organization in meeting customs stakeholders demand	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drugs and other illicit goods smuggling can be reduced 2. DGCE becomes a reliable, and trustworthy organization by the community
6	Joint program of DGCE and DGT	Optimizing government revenue and law enforcement in field of taxation, customs and excise	<ol style="list-style-type: none"> 1. The declining of very high risk importers on attempting evasion in paying tax, import duties, export duties, and excise duties 2. Increasing the government revenue 3. DGCE and DGT monitoring optimalization towards taxpayers who is also customs stakeholders 4. Domestic industry competitiveness improvement

No	Inisiatif Strategis	Tujuan	Outcome yang Diharapkan
7	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan	Mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis objek cukai, <i>quality assurance</i> , eksaminasi, penelitian ulang, dan audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerimaan cukai 2. Peningkatan kualitas penetapan tarif dan nilai pabean untuk optimalisasi penerimaan
8	Integrasi proses bisnis dan utilisasi <i>database</i>	Mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan, efektivitas pengawasan, efisiensi pelayanan, dan mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya upaya menghindari pembayaran pajak dan bea masuk/bea keluar/cukai 2. Peningkatan penerimaan negara 3. Peningkatan <i>awareness</i>, kewaspadaan, serta kedalaman analisis pengelolaan penerimaan Bea Cukai 4. Adanya <i>alert sistem</i> deteksi dini penerimaan yang komprehensif dan terintegrasi 5. Mitigasi dalam pengelolaan penerimaan Bea Cukai menjadi lebih optimal (<i>real time</i> dan komprehensif)
9	Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Memperkuat pondasi perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung pengembangan IKM berorientasi ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) IKM secara masif (penambahan jumlah pengguna fasilitas setiap tahun) dan tepat sasaran 2. Peningkatan ekspor nasional 3. Peningkatan produk ekspor dengan <i>branding</i> nasional 4. Peningkatan kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian nasional, dari segi PDB dan penyerapan tenaga kerja
10	Pemberian fasilitas tepat sasaran	Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan pemberian fasilitas kepada entitas yang tepat melalui revitalisasi pelaksanaan <i>money dan DAR (Disobedience Accumulative Record) System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pemahaman Pengguna Jasa KB tentang pentingnya peningkatan kepatuhan terkait fisik barang di KB 2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelayanan tempat penimbunan berikat (TPB) yang lebih efektif 3. Menurunnya risiko terjadinya penyalahgunaan fasilitas 4. Terciptanya pemberian fasilitas yang tepat sasaran untuk meningkatkan iklim investasi dan memenangkan persaingan industri di Asia
11	Penyederhanaan perizinan fasilitas	Efisiensi dan efektivitas layanan pemberian fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simplifikasi prosedur dan transparansi perizinan 2. Meningkatnya fokus pelaksanaan peran Kantor Pusat Bea Cukai sebagai <i>policy maker</i> 3. Menguatkan/menambah peran kanwil dalam fasilitas, sehingga pengawasan fasilitas lebih optimal 4. Meningkatnya peran <i>industrial assistance</i> Bea Cukai
12	Penguatan peran komunikasi dan citra Bea Cukai	Peningkatan pengetahuan <i>stakeholder</i> atas fungsi dan kinerja Bea Cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana <i>news gathering</i> dan pelaporan atas kegiatan kehumasan seluruh kantor secara <i>timely</i> dan terintegrasi. 2. Terciptanya saluran publikasi swakelola yang efisien dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Terciptanya organisasi kehumasan yang berfungsi sebagai <i>enabler</i> pembentukan citra organisasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik 4. Terwujudnya standar baku komunikasi dan publikasi Bea Cukai termasuk kejelasan pihak yang berwenang memberikan informasi kepada pihak eksternal (media), baik secara struktur maupun lingkup tugasnya. 5. Terbentuknya <i>database</i> yang terintegrasi untuk menyusun <i>profiling</i> pemangku kepentingan dalam rangka kegiatan komunikasi dan publikasi. 6. Tersedianya saluran komunikasi yang interaktif dan responsif serta melayani secara maksimal. 7. Tercapainya edukasi masyarakat yang efektif sehingga meningkatkan kepatuhan. 8. Meningkatnya pemahaman pengguna fasilitas kepabeanan 9. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas kepabeanan melalui mudahnya akses informasi untuk mengetahui tentang fasilitasi kepabeanan
13	Pengembangan otomasi pelayanan	Terwujudnya pelayanan yang lebih efektif dan efisien, mengurangi tatap muka dengan pengguna jasa, serta meningkatkan kecepatan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja pelayanan melalui otomasi seluruh layanan kepabeanan dan cukai 2. Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan yang lebih menyeluruh melalui sistem yang terintegrasi 3. Meningkatnya integritas pegawai melalui dukungan sistem <i>waskat</i> yang efektif 4. Mudahnya melakukan pencarian informasi baik oleh internal maupun eksternal

No	Strategic Initiatives	Goals	Expected Outcomes
7	Intensification and extensification government revenue	Optimizing government revenue with excise object expansion, quality assurance, examination, re-examination, and audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. The increasing of government revenue from excise 2. Quality improvement in tariff and value assessment to optimize government revenue
8	Business process and database utilization integration	Optimizing government revenue with the improvement of stakeholders compliance, control effectiveness, efficient service, and risk mitigation	<ol style="list-style-type: none"> 1. The declining of evasion attempt on paying taxes, import, export, and excise duties 2. Increasing the government revenue 3. The Increasing of awareness, alertness, and elaborate analysis on DGCE revenue management 4. Comprehensive and integrated early alert revenue monitoring system 5. Optimization of DGCE revenue management mitigation which is expected to be more comprehensive and updated real-time
9	Supporting Small-Medium Enterprise	Strengthening economic foundation and improving national economic growth with supporting the development of export oriented small-medium enterprise	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profoundly providing import facility for export for small-medium enterprise (the number of targeted facility recipients increases every year) 2. National export activities growth 3. Growth of export products with local brands 4. Growth of small medium enterprise contribution to national economy, in terms of gross domestic product and worker employments
10	Providing targeted facilities	Improving customs stakeholders compliance and providing facilities for targeted business entities through monitoring and evaluation program revitalization and DAR (Disobedience Accumulative Record) System	<ol style="list-style-type: none"> 1. Knowledge improvement for customs stakeholders on bonded zone about the importance of being compliant on declaring goods in bonded zone. 2. Technology and information utilization for effective supervision and conducting service in bonded storage. 3. To reduce the facility infringement risk 4. the establishment of targeted facility to improve investment climate and to compete with other Asia countries
11	Simplification of facilities licensing	Efficient and effective service on issuing facility licenses	<ol style="list-style-type: none"> 1. To simplify procedure and to make issuing license process transparent 2. To improve DGCE's role as policy maker 3. To expand regional office's role by giving authorization in issuing facility license so that it will optimize facility monitoring 4. To improve DGCE's industrial assistance role
12	Strengthening the role of communication and image of DGCE	Customs stakeholders knowledge improvement of DGCE duties and functions	<ol style="list-style-type: none"> 1. To provide a timely and integrated news gathering and public relation activities report platform for all vertical units 2. To create an efficient and targeted official publication channel in answering customs stakeholders' demand 3. To create public relations organization that functions as an enabler for forming organization image in order to raising public's trust 4. To create a standardized way of DGCE communication and publication, including to determine which section is authorized to give information to external parties 5. To develop an integrated database that compile profile of stakeholders in the interest of communication and publication 6. To provide an interactive and responsive communication channel, which also provide maximum service 7. To achieve an effective education system to society that will improve compliance 8. To improve the understanding of customs facility recipients about regulations 9. To increase customs facilities application with easily accessible information of customs facilities
13	Automation service development	The establishment of more effective and efficient service, reducing direct encounter between customs officer and stakeholders, and expediting service time.	<ol style="list-style-type: none"> 1. To increase service performance with the automation of all customs and excise services 2. To improve customs stakeholders compliance through the integrated comprehensive supervision system 3. To reinforce customs officers integrity through an effective inherent supervision system 4. To make ease for reference, both for internal and external parties

No	Inisiatif Strategis	Tujuan	Outcome yang Diharapkan
14	Pengembangan sistem kepatuhan pengguna jasa yang terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan yang handal di bidang kepabeanan dan cukai untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitas serta optimalisasi penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan pelayanan dan Percepatan Pelayanan (dari 5 hari menjadi 1 hari kerja berikutnya) 2. Peningkatan kepatuhan: Pada tahun 2017 100% Pengguna Jasa Kepabeanan menyampaikan SPT
15	Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan <i>dwelling time</i> dan EODB	Penurunan angka <i>dwelling time</i> dan percepatan pelayanan ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan budaya dari manual ke otomasi 2. Berkurangnya kontak antara petugas dan pengguna jasa 3. Perekaman LHP yang akurat dan cepat 4. Penurunan angka <i>dwelling time</i> menjadi 2,5 hari 5. Pelayanan ekspor yang cepat 6. Naiknya rating EODB
16	Revitalisasi peran Bea Cukai di perbatasan	Peningkatan signifikan pelayanan impor dan ekspor di perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelundupan di perbatasan dapat diminimalisir 2. Pelayanan dan pengawasan di daerah perbatasan yang maksimal, sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat perbatasan 3. Berkembangnya Industri kecil dan menengah di perbatasan 4. Bea Cukai menjadi intansi pemerintah terdepan yang dapat mendukung program nawacita Pemerintah yakni "Perbatasan sebagai Serambi Negara"
17	Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai	Efektivitas dan efisiensi pengawasan kepabeanan dan cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengawasan yang efektif 2. Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai 3. Mengoptimalkan penerimaan negara 4. Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanan dan cukai secara nasional 5. Tersedianya <i>tools</i> analisis terotomasi yang komprehensif untuk melakukan <i>targeting</i> pelanggaran kepabeanan dan cukai
18	Pemantauan pencetakan pita cukai	Penurunan peredaran rokok ilegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap proses pencetakan pita cukai dapat dilakukan secara lebih optimal dalam rangka pengamanan penerimaan negara 2. Kepatuhan yang tinggi dari pencetak PC kepada DJBC selaku otorisator PC
19	Revitalisasi peran dan sinergi kantor vertikal	Terciptanya lingkungan yang kondusif dan penajaman proses bisnis pelayanan dan pengawasan pada kantor vertikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam 3 bulan pertama terimplementasi 6 (enam) Zona Audit 2. Tercapai Kesamaan pandang atas konsepsi penanganan terhadap pengguna jasa kepabeanan dan Cukai dalam sinergi Unit Pusat dan Unit Vertikal 3. Proses bisnis pelayanan dan pengawasan pada kantor vertikal lebih efektif dan efisien 4. Kepatuhan pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai meningkat, penerimaan negara optimal, fungsi pembinaan lebih efisien dan pelaksanaan pengawasan lebih efektif

Quick wins merupakan capaian singkat yang menggambarkan bahwa secara keseluruhan program-program yang dirancang dalam Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai ini *reliable*, *achievable*, dan berjalan pada *track* yang semestinya. *Quick wins* juga merupakan *milestone* bagi keberhasilan tahap berikutnya. Dipilihnya sebelas program tersebut melalui identifikasi dan pengukuran terhadap program-program yang dirancang dan telah dikalibrasi untuk dicapai dalam jangka waktu pendek (tiga bulan), serta berdampak signifikan bagi pencapaian program secara keseluruhan.

Kepala Seksi Pengembangan Proses dan Manajemen Transformasi Bea Cukai, **Reza Alexandro Wenas Dotulung**, menjelaskan, peningkatan sinergi antara Bea Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dilakukan dalam penguatan reformasi ini.

"Bea Cukai melakukan *joint analysis and business process* dengan DJP, di mana kedua instansi melakukan pertukaran data pemberitahuan pabean dan SPT untuk menasar tingkat kepatuhan pengguna jasa," terang Alex.

Dari sebelas *quick wins* tersebut, ada empat program yang secara spesifik merupakan bentuk sinergi DJP dan Bea Cukai, yakni sebagai berikut:

1. Penertiban Importir Bermasalah

Terdapat 674 importir berisiko tinggi yang telah diblokir, setelah sebelumnya DJP menyampaikan tingkat kepatuhan para importir tersebut terhadap penyampaian laporan SPT. Bea Cukai juga telah mencabut 3.191 perusahaan yang tidak mengurus Angka Pengenal Impor (API). Selain melakukan pencabutan dan pemblokiran, Bea Cukai bersama DJP juga meneliti perusahaan untuk diblokir, 9.568 di antaranya diblokir karena tidak tidak

No	Strategic Initiatives	Goals	Expected Outcomes
14	Integrated customs stakeholders compliance system development for optimizing customs revenue	Customs stakeholders compliance improvement through accurate control of customs and excise activities in order to expedite service time, expand facilities, and optimize customs revenue	<ol style="list-style-type: none"> 1. To simplify the service and to expedite the service (from 5 work days to only 1 work day, on the following day) 2. Compliance improvement : in 2017, 100% customs stakeholders have submitted Tax Returns
15	Import and export service time acceleration to reduce dwelling time and improve ease of doing business rank	The reduce of dwelling time and export service time improvement	<ol style="list-style-type: none"> 1. To change the system from manual to automated 2. To reduce direct encounter between customs officers with customs stakeholders 3. To make an accurate and fast examination report recording 4. To reduce dwelling time to 2,5 days 5. To expedite export service 6. To increase Ease of Doing Business rating
16	Revitalization of DGCE role at nation's border	Significant improvement import and export service at nation's border	<ol style="list-style-type: none"> 1. To reduce smuggling attempts at the nation's border 2. To maximize service and supervision at nation's border in order to support border citizens economy 3. To develop small-medium enterprises at nation's border 4. To make DGCE as the front runner agency that supports government program that is "Perbatasan sebagai Serambi Negara"
17	Revitalization of customs and excise control system	Effective and efficient customs and excise control system	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effective monitoring activities 2. To improve customs and excise stakeholders compliance 3. To optimize government revenue 4. To create a nationwide integrated customs and excise supervision system 5. To provide an automated comprehensive analyzing tool to target customs and excise infringement
18	Excise bands printing monitoring	Reduction of illegal cigarettes	<ol style="list-style-type: none"> 1. To conduct an optimum supervision on excise bands printing in order to secure government revenue 2. To enforce high compliance on the printing press of excise band to DGCE as the excise band authorizer
19	Revitalization and synergy of DGCE vertical units	Conducive environment and revitalization of service and control in DGCE vertical units	<ol style="list-style-type: none"> 1. On the first 3 months, there has been 6 audit zones implementations 2. To reach a single conception of customs and excise stakeholders treatment, as a form of synergy between central unit and vertical unit 3. To reach efficient and effective supervision and service in vertical units 4. To improve customs stakeholders compliance, to optimize government revenue, to make efficient coaching function, and to make effective monitoring system

Quick wins are short-term goals that portray all of the designed programs of Customs and Excise Reform Reinforcement Program are reliable, achievable, and running on the right track. Quick wins are also milestone for the success of the next phase. Those programs were chosen through identifications and measurement of the short-term programs which can be achieved in just 3 months, also have significant impact to the overall achievements.

Head of development process and transformation management section, Reza Alexandro Wenas Dotulung, explained that DGCE and Directorate General of Taxes also intensified the synergy between them in the spirit of this reform.

"DGCE and Directorate General of Taxes has been conducting joint analysis and business process, where we exchange data of import declarations and annual tax returns (SPT) to target the stakeholders compliance," explained Alex.

Of the 11 quick wins, there are 4 specific programs as the result of synergy between DGCE and Directorate General of Taxes,

1. High risk importers control

674 high risk importers license have been blocked after Directorate General of Taxes submit the compliance of importers on tax return. DGCE has also revoked 3.191 importers license that don't administer the importer identity number. In addition to license revocation and blocking, DGCE together with Directorate General of Taxes also block the license of 9.568 companies due to import inactivity for 12 months, and 13.266 others are blocked for not submitting tax returns.

2. DGCE and Directorate General of Taxes Data Reconciliation Intensification

The reconciliation is conducted on import declaration and tax return data. DGCE has sent 662 very high risk



Bea Cukai melakukan *joint analysis and business process* dengan DJP, di mana kedua instansi melakukan pertukaran data pemberitahuan pabean dan SPT untuk menyoal tingkat kepatuhan pengguna jasa

melakukan kegiatan impor selama dua belas bulan, dan 13.266 perusahaan diblokir karena tidak menyampai-kan SPT.

2. Peningkatan Rekonsiliasi Data Bea Cukai dan DJP

Rekonsiliasi dilakukan terhadap data pemberitahuan impor barang (PIB) dan SPT. Bea Cukai telah mengi-irimkan data 662 perusahaan yang berstatus impor-tir berisiko tinggi, dan 30 perusahaan Kawasan Berikat dan Gudang Berikat ke DJP untuk diteliti kepatuhan perpajakannya. *Extra effort* juga dilakukan di bidang audit dan penelitian ulang dalam mengoptimalkan pe-nerimaan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

3. Penertiban Fasilitas Gudang Berikat (GB) dan Kawasan Berikat (KB)

Terdapat 18 perusahaan GB telah dicabut izinnya di tahun 2017, dan 32 perusahaan GB di akhir 2016. Semetara itu, untuk KB Bea Cukai telah memblokir 11 perusahaan di tahun 2017, dan 74 perusahaan di tahun 2016. Selain pencabutan, juga telah dilakukan pemblo- kiran terhadap 30 perusahaan Gudang Berikat, setelah DJP merekonsiliasi data kepatuhan penyampaian SPT perusahaan-perusahaan tersebut.

4. Pembentukan *Single Identity* antara Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dengan terbentuknya *single profile* perpajakan, nan- tinya akan dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga lain terkait untuk melakukan integrasi data. Kedepannya diharapkan ada perlakuan yang seragam terhadap wajib pajak antara Bea Cukai dan Pajak, se- hingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Capaian pada akhir Februari 2017, Bea Cukai dan DJP telah membuat aplikasi pemberlakuan *single identity* dan pada awal Maret 2017 aplikasi sudah berjalan seca- ra nasional dengan output data integrasi antara NPWP dan NIK.

Selain empat *quick wins* di atas, untuk lebih mendorong peningkatan efektivitas pengawasan dan efisiensi pelayan- an, penguatan reformasi ini juga menggarap otomasi sis- tem dan prosedur, juga ada tujuh *quick wins* lainnya guna mempercepat jalannya reformasi kepabeanan dan cukai, seperti berikut:

1. *Piloting* Pengendalian Titik Rawan Integritas

Telah dilakukan pemetaan awal terhadap titik rawan integritas yang berada di beberapa kantor Bea Cukai, antara lain Bea Cukai Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Cikarang, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Ngurah Rai. Selain itu juga telah disusun konsep pengawasan melekat (*waskat*) berbasis *auto- mated monitoring tools* (AMT), konsep dan pelaksana- an *piloting spot check*, serta *training of trainer* untuk level pimpinan guna penerapan sistem *couching, men- toring, counselling*.

2. *Automated Monitoring Tools* (AMT)

Aplikasi ini dirancang untuk memonitor transaksi ti- dak wajar atas kegiatan impor. Pelaksanaan *piloting* aplikasi ini akan dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk memonitor transaksi impor yang tidak wajar, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memonitor penerimaan yang tidak wa- jar, serta Direktorat Kepatuhan Internal untuk memoni- tor perilaku pemeriksa dokumen dan pemeriksa barang yang tidak wajar.

3. Otomasi Penutupan Manifest

Pembuatan aplikasi otomasi penutupan manifest te- lah disempurnakan. Payung hukum berupa Peraturan Direktur Jenderal dan Peraturan Menteri Keuangan ter- kait manifest juga akan dilakukan revisi sejalan dengan adanya aplikasi tersebut. Bea Cukai juga akan melaku- kan *piloting* aplikasi tersebut pada Kantor Bea Cukai Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta.

4. *Piloting* Perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) *Mobile*

Ini merupakan program untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan fisik dengan menggunakan Sistem Aplikasi Perekaman LHP online. Penerapan se- cara mandatori telah dilakukan di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok mulai 9 Maret 2017. Sementara, untuk penerapan aplikasi LHP *Mobile* untuk dokumen BC 2.3 dan BC 2.5, *piloting* dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Bogor pada 20 Maret 2017.

5. Penambahan Perusahaan *Compliant* yang Menerima Layanan Mitra Utama (MITA) dan *Authorized Economic Operator* (AEO)

Bea Cukai memberikan penghargaan dan apresiasi ke- pada para pengguna jasa yang memiliki reputasi kepa- tuhan yang baik. Sepanjang tahun 2016, telah diberikan sertifikasi AEO kepada 23 perusahaan. Hingga akhir Maret 2017, tercatat sudah ada 46 perusahaan yang mendapatkan sertifikasi AEO. Bea Cukai juga menetapkan 113 perusahaan MITA di tahun 2016, dan di tahun 2017 telah bertambah menjadi 264 perusahaan.

6. Otomasi Pembekuan Pabrik Rokok Ilegal

Tak hanya sektor kepabeanan, sektor cukai juga ikut mengalami reformasi. Salah satunya adalah pembuatan

importers data, and 30 bonded zone and bonded warehouse data to Directorate General of Taxes for the compliance investigation.

3. Bonded Warehouse and Bonded Zone Control

DGCE has revoked 18 Bonded Warehouse licenses in 2017, and 32 Bonded Warehouse at the end of 2016. Meanwhile, DGCE has blocked 11 Bonded Zone licenses in 2017, and 74 others in 2016. In addition to revocation, DGCE has also blocked 30 Bonded Warehouse licenses after Directorate General of Taxes reconcile their tax return submission compliance.

4. Single Identity Establishment between Customs Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP)

The establishment of single profile will be useful for other Ministry or Agencies in order to do data integration. In the future, it's hoped there will be fair treatment for the taxpayers of DGCE and Directorate General of Taxes in order to intensify the supervision. Until the end of February 2017, DGCE and Directorate General of Taxes has made single identity application, and at the beginning of March 2017 the application has been running nation-wide with the Customs Identification Number and Taxpayer Identification Number data integration as the result.

Other than 4 quick wins above, in order to enforce the supervision effectivity and service efficiency, the reform reinforcement is also working on the system and procedure automation which is established into 7 other quick wins in order to expedite the customs and excise reform, those are:

1. Piloting Integrity Vulnerable Spot Control

Integrity Vulnerable Spot initial mapping has been conducted in some customs and excise office such as Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Cikarang, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Ngurah Rai. In the other hand, inherent supervision concept is currently drafted which based on Automated Monitoring Tools (AMT), Spot Check piloting, and Training of Trainer for the leaders for the application of coaching, mentoring, counseling system.

2. Automated Monitoring Tools (AMT)

This application is designed for monitoring abnormal transaction on import activities. The application piloting is conducted by Directorate of Enforcement and Investigation to monitor abnormal transaction on import activities, and Directorate of Revenue and Strategic Planning, to monitor abnormal transactions, also Directorate of Internal Compliance to monitor functional officers for document verification and goods examination.

3. Manifest closing automation program

“

DGCE and Directorate General of Taxes has been conducting joint analysis and business process, where we exchange data of import declarations and annual tax returns (SPT) to target the stakeholders compliance

”

The design of this application has been refined. The legal basis, which are regulation of director general customs and excise and regulation of minister of finance, is refined as well as the launch of the application. DGCE will also launch the application in the prime customs office of Tanjung Priok and Soekarno Hatta.

4. Piloting of mobile examination report recording

This is a program to increase the efficiency of physical examination by using mobile examination report recording online application. The mandatory implementation of this application has been running in prime customs office of Tanjung Priok started from 09 March 2017. Meanwhile, mobile examination report recording application for BC 2.3 dan BC 2.5 will be implemented in Customs and Excise Medium Office of Bogor in 20 March 2017.

5. The augmentation of compliant companies receiving Mitra Utama (MITA) Kepabeanan and Authorized Economic Operator (AEO) facilities

DGCE has been awarding and showing appreciation to the stakeholders which have good compliance. Along 2016, DGCE has given 23 AEO certificate to 23 companies. Until at the end of March 2017, there are 46 companies with AEO certificates. DGCE has also set 113 MITA companies in 2016, and in 2017 the number increases to 264 MITA companies.

6. Illegal cigarette factory seizing automation

Not only customs, excise is being reformed as well. It's marked by the creation of illegal cigarette factory seizing automation. With this application, DGCE has revoked the license of 2 illegal cigarette factories in 2017, and has added 4 illegal cigarette factory, which previously

aplikasi otomasi pembekuan pabrik rokok ilegal. Bea Cukai telah mencabut secara otomatis dua pabrik rokok selama tahun 2017, dan menambahkan 29 pabrik rokok yang telah dicabut secara manual ke dalam database aplikasi. Selain pencabutan, Bea Cukai juga melakukan pembekuan terhadap dua pabrik rokok di tahun 2017, dan menambahkan empat pabrik rokok yang dibekukan manual pada tahun 2016 ke dalam *database* aplikasi. Tak hanya pencabutan dan pembekuan, aplikasi ini juga dirancang untuk menolak pemesanan pita cukai terhadap pabrik rokok ilegal. Sebanyak sebelas pabrik rokok tidak dilayani pemesanan pita cukainya.

7. Revitalisasi Peran Audit dan Sinergi Unit Pusat dan Vertikal

Program ini adalah bentuk revitalisasi peran unit pusat dan vertikal dalam pelaksanaan audit guna efisiensi dan efektifitas *post control*. Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal tentang *piloting* pelaksanaan fungsi audit di beberapa kantor wilayah. Selain itu, juga telah ditempatkan fungsional auditor di beberapa Kantor Wilayah Bea Cukai (*zoning* audit).

Menyadari pentingnya Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai ini, Menteri Keuangan melalui KMK No 909/KMK.04/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan telah diubah terakhir dengan KMK No 94/KM.1/2017 tanggal 23 Januari 2017, telah membentuk Tim Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai, yang terdiri dari:

- Tim Pengarah, yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Wamenkeu, Sekjen dan Irjen Kemenkeu, serta Kepala BKF.
- Tim Advisor, yang terdiri dari Mantan Menteri Keuangan, Mantan Dirjen Bea Cukai, Pengamat Ekonomi dan Perpajakan, serta kalangan profesional.
- Tim Observer, yang terdiri dari akademisi, asosiasi dunia usaha, perwakilan organisasi internasional, dan perwakilan media.
- Tim Pelaksana, adalah tim internal dari Bea Cukai.

Secara rinci tugas tim tersebut adalah sebagai berikut:

- Tim Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana yang berkaitan

dengan penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai dan yang berkaitan dengan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

- Tim Advisor mempunyai tugas memberikan masukan dalam rangka reformasi kepabeanaan dan cukai berdasarkan teori dan keilmuan yang dimilikinya.
- Tim Observer mempunyai tugas melakukan pengamatan dan memberikan masukan dalam rangka reformasi kepabeanaan dan cukai sesuai dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya.
- Tim Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan arah penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai, menyiapkan landasan hukum dan harmonisasi regulasi, serta melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Tim Pengarah dalam mempersiapkan penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai.

Penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai merupakan suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi Bea Cukai yang bertujuan mengubah/memperkuat struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan baik yang tidak tepat ataupun yang masih dapat ditingkatkan guna mencapai efektivitas tujuan organisasi dan menjawab harapan masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Hasil optimal yang akan dicapai yaitu meningkatnya fungsi

Bea Cukai yang optimal, adil dan terus menerus dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat guna meningkatkan fungsi Bea Cukai yang optimal, adil, dan terus menerus dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat guna mendukung tujuan pembangunan nasional.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung Bea Cukai dalam melaksanakan perubahan ini, karena dengan dukungan dari masyarakat saya yakin tujuan besar reformasi ini dapat terwujud dengan baik,” pungkas Ambang.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung Bea Cukai dalam melaksanakan perubahan ini, karena dengan dukungan dari masyarakat saya yakin tujuan besar reformasi ini dapat terwujud dengan baik,”

(DesiAPrawita/Rafiq)

had been seized, into the database of this application. Not only revoking and seizing the license, this application is designed to reject the order of excise band from illegal factories. There are, 11 cigarette factories which have been rejected.

7. Audit revitalization and synergy intensification between central unit and vertical unit

This program goal is to revitalize the role of central unit and vertical unit in conducting audit for post control efficiency and effectiveness. The regulation of director general of customs in piloting the implementation of audit function at several regional customs and excise offices has been declared. Furthermore, audit functional officers, also have been deployed in some regional customs and excise offices (audit zoning).

Realizing that the Customs and Excise Reform Reinforcement Program is vital, minister of finance, by the decision of minister of finance number 909/KMK.04/2016 date 19 December 2016 as amended by the decision of minister of finance number 94/KM.1/2017 date 23 January 2017, has formed Customs and Excise Reform Reinforcement team, which consists of:

- a. Steering committee, consists of: Minister of Finance, Coordinating Minister for the Economy, Vice Minister of Finance, General Secretary of Ministry of Finance, General Inspector of Ministry of Finance, and Head of Fiscal Policy Agency.
- b. Advisor committee, consists of: former minister of finance, former general director of customs and excise, economic and taxes expert, and professionals.
- c. Observer committee, consists of: academics, business associations, international organization representatives, media representatives.
- d. Executive committee, consist of : DGCE internal team.

The task of those committee is as follows:

- a. Steering committee's task is to give instruction related to reform reinforcement and coordination with other institution and related agencies to executive team
- b. Advisor committee's task is to give suggestion on reform reinforcement programs based on their field of expert.
- c. Observer committee's task is to observe and give suggestion on reform reinforcement programs based on the knowledge and experience of each field of expert
- d. Executive committee's task is to accommodate reform reinforcement programs policy-making, prepare the legal basis and regulation harmonization, also conduct the policy and other tasks which have been determined by the steering committee in preparing the reform reinforcement program.



Customs and Excise Reform Reinforcement is a fundamental change in DGCE bureaucracy system which aim to straighten the organization structure, alter the misbehavior and make it better to reach the organizational goals, and also answering the community's demand in supporting the national development. The result that will be achieved is the optimization of DGCE functions, fair treatment and continuous improvement, based on the improvement of integrity and strong organizational culture to support national development goals.

"We encourage to all Indonesia citizen to support DGCE in conducting the reform, because your support will help DGCE to achieve the main goals of this reform," said Ambang.

SEKRETARIS
TIM PENGUATAN REFORMASI
KEPABEANAN DAN CUKAI
SUGENG APRIYANTO



Mewujudkan Bea Cukai yang Kredibel, Kuat dan Akuntabel

Belum lama ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan adanya Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, bisa jelaskan secara singkat?

Tuntutan masyarakat kepada DJBC terus meningkat. Memberi fasilitas kepabeanan guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyediakan kemudahan ekspor-impor dalam rangka mempercepat arus logistik, melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya seperti narkoba, dan barang larangan lainnya, memastikan perlindungan industri dalam negeri, sampai dengan tetap melakukan optimalisasi penerimaan negara, menjadi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap DJBC. Menyadari hal itu, DJBC merespons tuntutan dan harapan masyarakat tersebut dengan menggulirkan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang ditandai melalui *kick-off meeting* yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 20 Desember 2016. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC sesuai asas pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat terwujud institusi Bea Cukai yang kredibel, kuat dan akuntabel.

Bagaimana reformasi yang sudah berjalan selama ini di Bea Cukai? Mengapa perlu adanya penguatan?

Sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa reformasi ini hadir sebagai respons dari tuntutan masyarakat yang terus meningkat kepada DJBC. Sesungguhnya, dalam kurun waktu sejak tahun 1995 hingga tahun 2016, DJBC telah enam kali melakukan perubahan/reformasi. Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa reformasi yang telah dilakukan DJBC diawali ketika tahun 1995 lahirnya UU Kepabeanan dan UU Cukai, kemudian tahun 2002 melalui pemanfaatan teknologi informasi dimulainya otomasi untuk mempercepat dan mengefisienkan pelayanan kepabeanan dan cukai, selanjutnya tahun 2006, seiring dengan diamandemennya UU Kepabeanan, bergulir program yang berfokus pada pemanfaatan lebih jauh TI, perbaikan organisasi, penyempurnaan sistem dan prosedur, serta peningkatan SDM dan perbaikan sistem remunerasi. Kemudian tahun 2007 seiring amandemen UU Cukai, bergulir pula reformasi yang ditandai dengan munculnya portal INSW, lahirnya Kantor Pelayanan Utama, serta pengembangan di

Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang mulai dicanangkan akhir tahun lalu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menyelesaikan 11 program penguatan reformasi (*quick wins*). Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Bea Cukai memenuhi harapan masyarakat yang ingin iklim investasi sehat dengan semangat perbaikan berkelanjutan pada area sumber daya manusia, organisasi, infrastruktur, anggaran, proses bisnis, peraturan dan sistem IT, *WBC* berkesempatan mewawancarai Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC, Sugeng Apriyanto, yang juga selaku Sekretaris Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Berikut petikan wawancara singkatnya;

sisi organisasi, proses bisnis, dan SDM. Lebih lanjut di 2010, adanya modernisasi seluruh Kantor Pelayanan Bea Cukai, penerapan sentralisasi sistem IT, dan diterapkannya pengukuran kinerja berbasis *Balance Score Card* menjadi pekerjaan penting reformasi di tahun tersebut. Dan terakhir, di 2014 perubahan lebih menyoar pada internal DJBC melalui penguatan kelembagaan, perluasan sistem IT, serta penguatan visi misi dan fungsi utama DJBC.

Reformasi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu sejak tahun 1995 hingga 2016 cenderung lebih menekankan pada aspek perubahan tatalaksana (proses bisnis). Setidaknya lebih dari 50 program perubahan tatalaksana telah digulirkan yang sebagian besar menitikberatkan pada otomatisasi dan simplifikasi layanan. Berbeda dengan program-program reformasi sebelumnya, penguatan reformasi DJBC di tahun 2017 ini menempatkan **penguatan budaya organisasi** dan **peningkatan integritas** sebagai roh penggerak perubahan, selain dengan tetap melaksanakan perbaikan berkelanjutan pada area sumber daya manusia, organisasi, infrastruktur, anggaran, proses bisnis, peraturan dan sistem IT.



Disebutkan juga bahwa integritas pegawai menjadi faktor penting keberhasilan reformasi kali ini, bisa jelaskan? Selain itu apa faktor keberhasilan lainnya?

Benar sekali, DJBC sangat menyadari bahwa integritas pegawai menjadi faktor penting keberhasilan reformasi. Sehingga roh dari penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai yang dilakukan saat ini adalah budaya organisasi dan peningkatan integritas. Hal ini juga yang membedakan reformasi yang menganut prinsip dasar: simplifikasi dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, sistemik dan terukur, digitalisasi proses, dan penerapan manajemen kinerja dan manajemen risiko ini dibandingkan reformasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dari pengalaman enam kali reform yang telah

dilakukan sebelumnya itu, didapat keyakinan bahwa budaya organisasi dan peningkatan integritas lah yang saat ini paling penting dan mendasar sebagai *concern* DJBC saat ini. Selain dilandasi dengan pondasi budaya organisasi, reform kali ini juga dikuatkan dengan pondasi kepemimpinan yang disadari

“

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC sehingga dapat terwujud institusi Bea Cukai yang kredibel, kuat dan akuntabel

”

menjadi faktor penentu bagi keberhasilan reform ini.

Faktor lain yang juga disadari menjadi penentu keberhasilan reform ini adalah adanya keterlibatan pihak eksternal DJBC (*observer, adviser, dan stakeholder*). Keterlibatan ini guna menunjukkan reform ini terbuka dan akomodatif terhadap masukan dari pihak eksternal yang sifatnya positif maupun korektif. Disamping itu, internalisasi yang terprogram dan massif kepada seluruh pegawai DJBC disadari sangat diperlukan guna menumbuhkan *engagement* dan *ownership*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya program yang disebut *Reform by Location*. Melalui program ini setiap unit vertikal ditingkat wilayah dan kantor pelayanan dilibatkan dalam pelaksanaan reform. Kantor wilayah dan kantor pelayanan diminta untuk merancang dan menjalankan program reform yang spesifik sesuai dengan kekhasan masing-masing daerahnya dengan tetap sejalan dengan program besar reform tentunya. Dengan demikian diharapkan *engagement* dan *ownership* dari seluruh pegawai DJBC di Indonesia dapat terwujud karena merasa memiliki dan dilibatkan dalam proram reform kali ini.

Juga disebutkan ada program-program yang bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana peran Bea Cukai dalam mengawal program-programnya?

Ya, salah satu yang juga membedakan reform kali ini dengan reform-reform sebelumnya adalah adanya sinergi antara



aparat fiskal DJP dan DJBC. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk joint program DJBC dan DJP, mulai dari *joint data*, *joint analysis*, *joint audit*, sampai dengan *joint collection*. Dengan adanya sinergi ini diharapkan tercipta optimalisasi pengawasan terhadap WP yang juga merupakan pengguna jasa kepastian dan cukai secara bersama-sama oleh DJBC dan DJP sehingga terjadi penurunan upaya menghindari pembayaran pajak dan bea masuk/bea keluar/cukai yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Kalau ditanya terkait peran Bea Cukai dalam mengawal program sinergi tersebut, tentu bukan hanya mengawal namun secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penyusunan konsep, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi program, baik DJP dan DJBC terlibat secara aktif dan bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk programnya yaitu, *secondment* – penempatan sementara waktu pegawai DJBC di DJP dan sebaliknya – yang secara teknis merupakan integrasi proses bisnis yang saling beririsan antara DJP dan DJBC yang dikategorikan dalam 3 area yaitu: *back office*, *middle office* dan *front office*. Sehingga melalui *secondment* ini diharapkan tercipta pengawasan fiskal kepada wajib pajak yang juga pengguna jasa kepastian secara lebih efektif dan efisien, dapat menutup ruang celah pelarian pajak (BM, Cukai, PPN, PPh, PPnBM), yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara.

Apa parameter bahwa program-program Penguatan Reformasi Kepastian dan Cukai dikatakan telah berhasil?

Program Penguatan Reformasi Kepastian dan Cukai ini dikatakan berhasil apabila kepercayaan publik terhadap DJBC meningkat dan tercipta institusi yang kredibel dan akuntabel. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Diharapkan melalui upaya pemberantasan perdagangan ilegal, menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli/korupsi, serta selalu berorientasi pada kepuasan pengguna jasa, kepercayaan publik terhadap DJBC dapat terbangun. Dan melalui kebijakan yang berfokus pada penerimaan yang optimal, pengawasan yang efektif, fasilitasi tepat sasaran, serta memberikan pelayanan yang prima dapat tercipta institusi yang kredibel dan akuntabel.

Terakhir, sebagai penutup apa yang ingin Bapak sampaikan terkait Program Penguatan Reformasi Kepastian dan Cukai ini?

Sebagai simpulan, saya ingin menegaskan bahwa melalui Program Penguatan Reformasi Kepastian dan Cukai ini kita berkeyakinan bahwa harapan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dapat diwujudkan, yakni terbentuknya institusi Bea Cukai yang kredibel dan bisa dipercaya publik, mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, mengumpulkan penerimaan negara, menciptakan kepastian usaha, serta melayani masyarakat dengan profesionalisme, integritas dan efisiensi yang tinggi. Namun demikian, kami sangat menyadari tanpa dukungan dari semua pihak mustahil harapan itu dapat terlaksana dengan baik, untuk itu saya mengharapkan dukungan dari semua pihak mulai dari internal DJBC, pihak eksternal (Kemenkeu dan K/L terkait), serta para *stakeholders* DJBC, agar reform kali ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Terakhir, saya ingin menyampaikan kutipan pesan Ibu Menteri Keuangan kepada jajaran DJBC yang selalu beliau ulang-ulang pada berbagai kesempatan yaitu, **“jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini !!!”**. (DesiAPrawita/Rafiq)



Impor Obat-Obatan Khusus

*Untuk kepentingan pengobatan perseorangan dengan pemasukan obat tanpa izin edar dari luar negeri dan dikirim melalui pos atau jasa pengiriman barang, konsumen dapat menggunakan izin **Special Access Scheme (SAS)**.*

Indonesia adalah satu negara yang memiliki keragaman hayati terbesar di dunia. Flora dan fauna sangat luar biasa yang dapat dikembangkan untuk industri obat berbasis bioteknologi (biomolekuler dan rekayasa genetika) dan industri obat herbal. Secara umum, industri farmasi Indonesia masih mengimpor 96 persen bahan baku obat, baik untuk bahan aktif (*active pharmaceutical ingredients/API*) maupun bahan pembantu (*excipient*). Lebih detilnya Indonesia mengimpor hampir keseluruhan dari 851 item bahan aktif dan 441 bahan pembantu.

Beberapa sumber menyebutkan industri farmasi nasional hanya memproduksi tahap akhir bahan baku obat. Sedangkan semua bahan baku antara (*intermediate*) berasal dari luar negeri, terutama Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Tingginya angka impor bahan baku obat dapat menimbulkan permasalahan seperti tak adanya kesinambungan bahan baku, kualitas bahan baku yang tidak terjamin, harga yang tidak stabil, dan kekosongan obat. Salah satu alasan tingginya angka impor bahan baku obat adalah kecilnya persentase pangsa pasar Indonesia dibandingkan pangsa pasar dunia. Pangsa pasar Indonesia itu hanya 0,4 persen dari pangsa pasar obat-obatan dunia.



Sehingga jika produksi bahan baku sendiri dan hanya dijual di Indonesia, tidak akan efektif bagi perusahaan farmasi. Juga adanya persaingan ketat di industri farmasi membuat langkah Indonesia untuk memproduksi bahan baku sendiri tampaknya sulit diwujudkan. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat luar negeri sangat riskan mengingat obat tidak hanya memiliki peran penting dari aspek kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi.

Dari aspek kesehatan, mengacu Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, obat memiliki peran dalam penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Adapun dari aspek sosial, obat merupakan komoditas yang memiliki peran penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat luas. Sementara itu, dari sisi ekonomi, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan pelayanan dalam memperoleh obat-obatan merupakan hal yang harus dipenuhi.

Dalam beberapa kesempatan, pihak Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa pengembangan bahan baku obat oleh industri farmasi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yakni mengembangkan kebijakan untuk pengembangan produk bahan baku obat, mensinergikan dunia usaha dan pemerintah, memperkuat riset yang berorientasi pada kebutuhan dan meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga industri farmasi tidak lagi ketergantungan bahan impor yang menyebabkan harga obat menjadi mahal.

Dalam hal ini mungkin Indonesia perlu belajar dari Singapura. Dalam mengembangkan bahan baku obat, Singapura mengundang pakar-pakar internasional, dan mengundang industri multinasional untuk bekerjasama yang sebagian investasinya berasal dari Singapura. Salah satu institusi riset yang lahir seperti ini adalah Merlion Pharma, yang mengembangkan bahan baku obat dari sumber daya alam, dan berawal dari Glaxo. Awalnya mengembangkan secara bersama, kemudian Singapura mengembangkan sendiri dengan komitmen yang sangat kuat. Negara yang sudah maju saja perlu kemitraan global, demikian juga seharusnya Indonesia. Masing-masing peneliti mengembangkan ilmunya antara lain berdasarkan referensi hasil penelitian berbasis hasil peneliti lain melalui jurnal, pertemuan-pertemuan ilmiah, konferensi, pengembangan kapasitas peneliti, dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Special Access Scheme

Menyikapi persoalan dalam pemenuhan obat impor secara mendesak khususnya bagi pasien dengan penyakit langka, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperbolehkan penggunaan izin "Special Access Scheme" atau lazim disingkat SAS. "Untuk kepentingan pengobatan perseorangan dengan pemasukan obat

tanpa izin edar dari luar negeri dan dikirim melalui pos atau jasa pengiriman barang, konsumen dapat menggunakan izin SAS," ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (KIAL) Bea Cukai Robert Leonard Marbun.

Robert menjelaskan penggunaan izin SAS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) itu dimungkinkan apabila obat tersebut sulit didapatkan di Indonesia dan dibutuhkan segera, terutama bagi pasien penyakit tertentu. Setelah pihak pasien mengantongi izin ini, petugas Bea Cukai akan langsung mengeluarkan obat-obatan tersebut. Robert mengharapkan dengan pemanfaatan adanya izin SAS kebutuhan obat dapat terpenuhi dan masyarakat bisa memperoleh pengobatan yang lebih baik.

BPOM mensyaratkan bahwa seluruh obat yang masuk ke Indonesia telah memiliki izin edar, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor, dan mendapat persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor (SKI) yang hanya berlaku untuk satu kali pemasukan. Selain itu, BPOM juga tidak mengizinkan importasi obat secara perseorangan, karena saat ini SKI dari Kepala BPOM hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang mengedarkan produk impor.

Sementara itu Kepala Kantor Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, Nurtanti Widyastari mengungkapkan bahwa pengawasan atas pemasukan atau importasi obat-obatan dari luar negeri merupakan salah satu tugas yang diamanatkan kepada Bea Cukai dari instansi-instansi pemerintahan atau kementerian/lembaga terkait di Indonesia, antara lain Kementerian Kesehatan dan BPOM. Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai terhadap importasi obat-obatan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat



yang tidak tepat, dan atau yang tidak memenuhi persyaratan mutu, manfaat dan keamanan atas obat yang diimpor.

“Bea Cukai Pasar Baru bertugas menangani pelayanan dan pengawasan barang kiriman yang masuk dari luar negeri melalui kiriman pos, termasuk pemasukan atas obat-obatan. Setelah dilakukan pemenuhan persyaratan impor atas obat-obatan dimaksud, petugas Bea Cukai dapat segera mengeluarkan obat-obatan tersebut dan PT Pos Indonesia dapat melakukan distribusi atas obat dimaksud kepada konsumen yang telah memiliki izin impor,” ujar Tanti.

Lebih lanjut Tanti menjelaskan bahwa pemasukan obat dari luar negeri melalui barang kiriman baik melalui kiriman pos atau perusahaan jasa titipan diperlukan pemenuhan persyaratan atas impor obat dimaksud dari Kementerian Kesehatan dan BPOM seperti halnya SAS. Untuk kepentingan pengobatan perseorangan dengan pemasukan obat tanpa izin edar dari luar negeri dan dikirim melalui pos/jasa pengiriman barang, konsumen cukup mengantongi izin yang dibutuhkan, dan petugas

Bea Cukai dapat segera mengeluarkan obat-obatan tersebut.

Di Kementerian Kesehatan, untuk pemenuhan izin impor atas pemasukan obat dari luar negeri untuk pemakaian pribadi selain pemasukan obat untuk penelitian dan pengembangan, produk biologi/serum/vaksin, obat tradisional, kosmetik suplemen kesehatan dan pangan olahan, dapat berkomunikasi dengan layanan “Halo Kemkes” di 1500567 dengan waktu layanan 24 jam atau melalui email: kontak@kemkes.go.id atau sms ke 081281562620.

Sementara di BPOM, sesuai dengan Surat Kepala BPOM Nomor B-IC.01.1.74.11.16.4107 tanggal 21 November 2016 hal Konfirmasi Mengenai pemenuhan Impor Untuk Impor Barang Kiriman disebutkan. Berkaitan dengan Impor Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan keperluan pribadi atau keperluan tertentu, BPOM memberlakukan mekanisme khusus berupa pemberian SAS sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 39 Tahun 2013.

Bea Cukai Pasar Baru bertugas menangani pelayanan dan pengawasan barang kiriman yang masuk dari luar negeri melalui kiriman pos

Permohonan SAS diajukan hanya untuk kepentingan pengobatan atau mendukung penyembuhan suatu penyakit yang dibuktikan dengan melampirkan rekomendasi dan data dukung berupa riwayat penyakit pasien. Persetujuan SAS tidak diberikan untuk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan Tertentu jika produk sejenis sudah tersedia di pasaran Indonesia dan memiliki izin edar BPOM. Untuk persyaratan yang diperlukan dilengkapi, konsumen dapat berkomunikasi dengan layanan “Halo BPOM” di 1500533 pada hari kerja pk. 08.00 WIB s.d 18.00 WIB atau bertempat BPOM Jl. Percetakan Negara no. 23 Jakarta Pusat pada hari kerja pk. 08.00 s.d. pk. 16.00 WIB.

Cara Memperoleh Obat Khusus

Banyak kasus membuktikan, untuk mengobati penyakit tertentu, kita membutuhkan jenis atau merek obat yang amat spesifik. Namun tidak semua obat tersedia di Indonesia, dan kalau pun ada, kadang harga beli obat dari luar negeri masih jauh lebih murah ketimbang di apotek terdekat. Beberapa obat yang memerlukan resep dokter di Indonesia juga ternyata dijual bebas di negara lain, sehingga kita tak perlu

harus dipenuhi oleh produk obat dan makan impor agar bisa lolos masuk ke Indonesia, yaitu produk harus memiliki izin edar resmi dari BPOM, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor, dan mendapatkan persetujuan Kepala BPOM berupa SKI.

Peraturan ini dicanangkan karena kebanyakan obat dari negara lain yang tersedia untuk pembelian oleh individu

Akan tetapi, SKI dari Kepala BPOM diberikan terbatas hanya kepada instansi negara dan/atau perusahaan swasta yang memiliki lisensi untuk mengedarkan produk impor. Oleh karena itu, ilegal hukumnya bagi perorangan untuk mengimpor obat (obat medis, obat kuat, obat herbal, suplemen kesehatan) ke Indonesia lewat situs belanja komersil atau apotek *online* demi digunakan sendiri jika tidak memiliki izin edar atas



repot bolak-balik ke dokter untuk memperbarui resep.

Situs apotek *online* seperti evermeds.com, asiapharm.net, unitedpharmacies-uk.md, atau brandmedicines.com menjadi tujuan favorit bagi banyak orang untuk mendapatkan akses cepat ke obat yang mereka butuhkan. Apakah boleh beli obat dari luar negeri untuk dipakai sendiri? Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No 27 Pasal 2 dan 3 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, ada sejumlah syarat yang

seringnya tidak memenuhi syarat atau belum disetujui oleh BPOM untuk di edarkan dan dipergunakan secara luas di Indonesia. Sebagai contoh, banyak negara Uni Eropa, Asia, dan Amerika Latin yang memperbolehkan penjualan obat batuk yang mengandung dextromethorphan. Tapi dextromethorphan adalah obat kelas morfin yang dikategorikan sebagai narkotika di Indonesia. Sehingga mengirim obat ini ke dalam negeri sama saja dengan tindakan penyelundupan narkoba, bahkan dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi.

nama *consignee* atau penerima barang melalui jasa kiriman (Pos/PJT).

Semua kegiatan yang berkaitan dengan kontrol lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan wilayah Indonesia diatur oleh Bea Cukai, termasuk pula makanan dan obat-obatan. Dengan demikian, bila kita tidak mampu menunjukkan sertifikasi resmi apapun dari BPOM atau instansi terkait, kita dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, atau obat impor kita akan ditahan dan/atau dimusnahkan. Selain sanksi administratif, kita juga dapat dikenakan sanksi



pidana. Perihal sanksi untuk pelanggaran impor obat dan makanan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013.

Ketentuan larangan dan pembatasan ini juga mencakup aktivitas impor obat yang diwakili. Misalnya saat barang tersebut dikirim menggunakan Pos (EMS/USPS) atau jasa pengiriman lainnya (DHL, TNT, FedEx, UPS, Aramex dll), atau beli obat di luar negeri atas nama kerabat atau teman yang tinggal di negara tersebut untuk kemudian dikirim ke rumah anda di Indonesia.

Bagaimana jika beli obat dari luar negeri saat sedang melancong, lalu dibawa pulang ke Indonesia? Ketentuan larangan dan pembatasan pemasukan barang impor sebenarnya juga termasuk contoh kasus di mana anda membawa sendiri obat hasil beli di

luar negeri tersebut. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan, penggunaan yang tidak tepat, dan atau yang tidak memenuhi persyaratan mutu, manfaat, dan keamanan atas barang impor tersebut.

Namun, meski praktik beli obat dari luar negeri teknisnya adalah tindakan ilegal yang bisa menjerumuskan anda ke jalur hukum, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan dispensasi berupa Keputusan Menperindag No. 314/Kp/VIII/1974, yang memungkinkan konsumen untuk mengimpor obat legal melalui laut atau udara untuk penggunaan pribadi jika memang bisa dibuktikan dengan resep dokter. Ketika situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk beli obat dari luar negeri dan membawanya kembali Indonesia, kita wajib menyerahkan copy surat

keterangan dokter dan/atau resep resmi (ingat: tidak termasuk bill pembelian) yang melampirkan nama jelas pasien, dosis, frekuensi dosis, dan nama obat yang benar saat melakukan pemeriksaan CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina) di terminal kedatangan.

Jika tidak, obat akan dimusnahkan, sebab petugas Bea Cukai tidak mungkin bisa mengetahui manfaat dari obat-obatan tersebut tanpa adanya bukti resep dokter. Namun demikian, formulasi obat umum (misalnya suplemen multivitamin generik atau obat-obatan yang juga dijual di Indonesia tapi dalam versi/varian berbeda) biasanya tidak akan begitu bermasalah selama dapat dengan mudah diidentifikasi oleh petugas bandara dan disesuaikan dengan kebutuhan yang dinyatakan oleh si pelancong itu sendiri. **(pomo)**



Kekuatan Tertinggi Sejatinya Bunga

Pria bernama lengkap **Parikesit Jati Kusumo** tidak menyangka kalau dirinya terjun ke hal-hal seperti patroli laut. Walaupun saat ini posisinya lebih banyak di balik meja tapi bekerja di lingkungan patroli laut tidak pernah terpikirkan semasa ia sekolah.

Mendengar namanya tentu bagi beberapa orang terutama masyarakat Jawa akan langsung teringat salah satu tokoh perwayangan. Ternyata nama unik yang diberikan orang tuanya memang mempunyai cerita tersendiri.

Pada awalnya bujang yang biasa dipanggil Paris ini akan diberikan nama Safi'l oleh orang tuanya tetapi menurut keluarga besar nama itu tidak bagus sehingga kemudian Kakeknya memberikan nama yang disandanginya sekarang, Parikesit Jati Kusumo. Kebetulan kakek dan ayahnya hobi banget dengan perwayangan. Sejak kecil pun, Paris sering diajak untuk melihat pertunjukan wayang oleh ayahnya.

Setelah bertanya kepada kakeknya mengenai arti nama tersebut, masing-masing katanya memiliki arti tersendiri seperti Parikesit berasal dari bahasa sansekerta yang artinya Kekuatan Tertinggi, sedangkan Jati bermaksudkan jati diri, dan Kusumo artinya bunga.

“Jadi, arti nama saya kekuatan tertinggi sejatinya bunga. Sedangkan makna dan harapan kakek saya memberikan nama tersebut adalah jika saya memiliki kelebihan lebih dari orang lain diharapkan jati diri saya hati saya tetap lembut, kalem, rendah hati bagaikan bunga karena bunga identik sama yang kalem-kalem.

Kan banyak gitu orang yang punya kekuasaan lebih tapi semena-mena sama kepada orang lain.”

Kerendahan hatinya terlihat saat diwawancarai WBC, yang berusaha belajar hal-hal baru walaupun tidak mengerti dan tidak mudah menyerah dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, sejalan dengan hobinya yaitu membaca berita/update terkini.

Walaupun awalnya tidak mengerti sama sekali dengan lingkungan kapal seperti saat ini, Paris berusaha untuk menyesuaikan. Pada saat bergabung di PSO Bea Cukai Pantoloan memang masih kurang SDM-nya, jadi ia langsung ditempatkan di seksi Nautika untuk mengelola SDM ABK yang ada lebih dari 100 orang.

“Bagi saya itu hal baru lagi, baru lulus sekolah belum terbiasa menghadapi orang banyak tetapi diharuskan untuk menyesuaikan, harus berani menghadapi orang dengan berbeda karakter. Itu uniknya masuk Bea Cukai bagi saya, harus siap ditempatkan dimana saja, sesuai atau tidak sesuai *passion*, ya harus dijalani.”

Posisinya saat ini berada di bagian Seksi Nautika yang bertugas mengatur ABK mulai dari menjadwalkan patroli hingga mengurus IKU para ABK. Dijelaskan lebih lanjut oleh Paris, di Seksi Nautika dibagi menjadi 3 tanggung jawab, yaitu ‘pergerakan’, ‘survey’, dan ‘awak kapal’. Pergerakan yang dimaksud adalah mengurus kapal mana yang akan dipakai dengan segala kelengkapannya. Survey di sini adalah bagaimana kelayakan kapal-kapal terutama sebelum dan sesudah digunakan patroli, Sedangkan ‘awak kapal’ yaitu manajemen ABK dan dirinya mendapatkan tanggung jawab di bagian ini.

Posisinya yang di ‘awak kapal’ tentu tidak hanya sekedar mengatur tapi juga harus mendengarkan dan memahami bagaimana tantangannya bertugas di lapangan alias berpatroli. Diceritakan oleh Paris keluhan yang paling banyak diutarakan adalah masalah

lamanya patroli hingga merasa jenuh dan butuh kenyamanan. Hal-hal seperti itu bagi Paris perlu dikomunikasikan dengan baik seperti kalau pulang patroli diizinkan untuk istirahat dulu beberapa waktu sebelum nanti patroli lagi.

“Saat mengatur para ABK kita juga perlu mendengar masukan dan saran selain juga pengalaman. Agar lebih mengenal karakter-karakter terkadang saya pun ikut patroli.”

Sebelum mendaftar untuk Anak Buah Kapal (ABK), Paris pernah mencoba daftar Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) setelah lulus dari SMK Telekomunikasi 2011 di Semarang. Hanya saja saat itu belum beruntung sehingga tidak diterima di STAN dan akhirnya lanjut dengan kuliah reguler di salah satu Perguruan Tinggi di Semarang.

Setelah mengikuti kuliah selama 2 semester, Paris mendapatkan informasi dibuka pendaftaran untuk Anak Buah Kapal Bea Cukai dari penerimaan umum. Paris pun mencoba mengikuti tesnya dan lulus untuk penerimaan Semarang. Setelah menjalani *On Job Training* (OJT) atau masa orientasi 5 bulan di Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung Priuk, Paris resmi bergabung di bea cukai dengan penempatan PSO Bea Cukai Pantoloan terhitung 2 Juni 2013.

Bakatnya ‘mengatur’ orang ternyata sudah terlihat semenjak sekolah. Dirinya pernah jadi anggota OSIS di SMKN 5 Semarang dan juga sempat bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Semarang. Kegiatan saat ini karena sudah lebih banyak di ruangan, Paris mengikuti kuliah Universitas Terbuka (UT) di Palu untuk mengejar S1. UT dipilihnya karena waktunya yang fleksibel dan tidak perlu datang untuk mengikuti pelajaran kuliahnya karena bisa belajar secara online.

Dalam menjalani apapun, pegawai yang kecilnya bercita-cita menjadi penegak hukum ini berprinsip ‘Hidup ini hanya sementara jadi apapun yang dilakukan itu hanya sementara dalam artian apapun.’

“Jadi maksudnya yang kita dapat, baik itu enak atau tidak enak itu hanya sementara. Kalau sedang mendapat hal enak ya harus bersyukur dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita pas mendapatkan tidak enak ya kita jalanin dan tetap semangat menjalaninya.”

Hal yang juga lagi ingin banget dilakukan Paris dalam waktu dekat itu adalah berbisnis. Rencana bisnis yang dijalani adalah usaha *vapor* atau rokok elektrik yang mulai marak digunakan masyarakat saat ini. Paris sendiri tidak menggunakan *vapor* tapi melihat peluangnya cukup besar sehingga coba untuk dijalankan usahanya bersama sahabatnya di Semarang. Ke depannya juga Paris ingin buka usaha kuliner di Palu.

Terhadap institusi dimana Paris mencurahkan kemampuannya, ia memiliki harapan tersendiri yaitu kesempatan berkarir dan khususnya buat beasiswa pendidikan itu tidak hanya untuk penerimaan dari D1 saja atau S1 saja yang diberikan kesempatan, tapi untuk teman-teman yang dari penerimaan SMK Umum juga perlu diperhatikan agar kesempatannya untuk mengembangkan diri merata. Bahkan jika bisa izin belajar di luar kedinasan itu tidak lagi dibatasi berdasarkan pangkat dan golongan.

Karena menurut pendapat Paris pembatasan justru akan membebani pegawai, banyak sekali pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan minat belajar tinggi tapi karena ada pembatasan izin belajar berdasarkan pangkat



dan golongan itu membuat mereka jadi putus asa.

“Menurut saya peraturan semacam itu merugikan instansi karena seharusnya diberlakukan sebaliknya, mewajibkan pegawai untuk sekolah setinggi-tingginya, bukan membatasi berdasarkan pangkat dan golongan. Jika semua pegawai bisa berpendidikan tinggi dan berwawasan luas karena diwajibkan dan dituntut untuk sekolah yang lebih tinggi, itu mungkin akan lebih menguntungkan instansi karena bisa membuat makin baik instansi kita.”

Apalagi kedepannya menurut UUD ASN (Aparatur Sipil Negara) semua pegawai negeri menjadi pegawai fungsional yang akan dipekerjakan dan dibayar sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing, hal tersebut tentu sulit jika kondisi untuk izin belajar mengembangkan potensi dan menuntut ilmu yang lebih tinggi masih dibatasi, sehingga akan menjadikan tidak mempunyai nilai jual dan daya saing yang rendah.

“Saya berpendapat begitu karena saya berkaca kepada senior saya, banyak sekali yang seharusnya mampu untuk menjadi lebih dari yang sekarang tapi tidak ada kesempatan untuk mereka jadi mereka disalip sama junior-junior yang baru masuk. Hal itu terjadi mungkin saja karena mereka saat masih muda tidak dituntut untuk belajar jadi ketika sudah tua tidak memiliki kontribusi yang lebih untuk instansi yang seharusnya mereka masih bisa berkontribusi.” (DesiAPrawita)

KETIKA GIGI TUMBUH BERJEJAL



Banyak dari orang tua yang membawa anaknya kedokter gigi diawali oleh rasa cemas saat menyadari adanya kelainan pada gigi anak mereka. Salah satu kelainan tersebut adalah gigi yang berjejal, berubah posisi, giginya jarang-jarang, gigitan gigi rahang atas dan bawah dalam, tonggos dan lain-lain. Keadaan ini disebut dalam dunia kedokteran dengan *Maloklusi*, dimana hubungan kontak antara gigi di rahang atas dengan bawah tidak normal.

Gigi berjejal atau berantakan di dalam lengkung rahang juga seringkali menjadi keluhan pasien terutama dari faktor estetika. Sehingga pasien datang ke dokter gigi spesialis orthodonti.

Perawatan orthodonti bukan saja untuk memperbaiki faktor estetika, tetapi juga memperbaiki masalah fungsionalnya. Berjejalnya gigi diluar susunan gigi yang normal terjadi karena ada ketidak sesuaian antara ukuran gigi dengan dimensi lengkung rahang. ketidak sesuaian tersebut menyebabkan kondisi positif atau negatif, artinya bila negatif maka gigi mengalami kekurangan tempat di dalam lengkung rahang, sedangkan bila positif, maka terdapat banyak sisa atau space di

dalam lengkung rahang sehingga nampak renggang-renggang.

Gigi berjejal dikategorikan menjadi 2:

1. Gigi berjejal simpel, yaitu ada ketidak harmonisan antara ukuran gigi dengan ruangan yang tersedia, tetapi tidak disertai dengan gangguan pada skeletal, otot, fungsional oklusi (kontak gigit rahang atas dengan rahang bawah).
2. Gigi berjejal kompleks, yaitu gigi berjejal yang disebabkan oleh ketidak seimbangan skeletal, fungsi bibir, lidah serta oklusi.

Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui sebab dari gigi yang berjejal, tetapi hingga saat ini masih belum dapat di ketahui secara pasti. Beberapa peneliti menyimpulkan hal ini adalah karena faktor genetik dan lingkungan, tetapi ternyata bukan hanya faktor tersebut diatas. Faktor penyebab gigi berjejal adalah:

- ❖ genetik, dimana terjadi pengurangan ukuran rahang namun tidak diikuti oleh pengurangan ukuran gigi, jumlah gigi.
- ❖ sindrom genetik, ada kehadiran DNA Y.
- ❖ cacat pada perkembangan embrio saat pembentukan gigi
- ❖ lingkungan; ada tekanan terus menerus, lebih dari 6 jam sehari pada saat pertumbuhan gigi, misalnya

menghisap ibu jari dengan intensitas cukup lama.

- ❖ Ada trauma pada gigi sulung, sehingga gigi permanennya bergeser.
- ❖ Meminum susu dengan dot terutama menjelang tidur, yang menyebabkan gigi karies.
- ❖ Transposisi (gigi berubah posisi)
- ❖ Gigi sulung persistensi (tidak teresorpsi)
- ❖ Gigi sulung prematur loss (lepas sebelum waktunya)
- ❖ Proses evolusi, karena makanan manusia moderen yang lebih lunak.



Pengukuran dan analisa lebar gigi yang mengalami ketidak sesuaian dengan lengkung rahang sebaiknya dilakukan lebih dini, agar tidak terjadi maloklusi (kesalahan oklusi). Bila sudah terlanjur terjadi kesalahan oklusi, sebaiknya di lakukan perawatan orthodonti, agar tercipta susunan gigi yang lebih bagus dan estetika yang baik.

Oleh: drg. IG.A Heni H Poliklinik Kantor Pusat DJBC

Menulis Perjalanan Hidup di Blog



Perkembangan media sosial saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Setiap aktivitas dan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah dapat dimuat di media sosial yang bisa dibagikan kepada setiap teman atau pembaca lainnya. Cukup banyak jenis media sosial yang bisa digunakan melalui internet yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain, baik dalam bentuk percakapan, teks, foto, video, dan peta untuk berbagi cerita dan pengalaman, serta saling tukar informasi.

Salah satu media pribadi yang sering digunakan dalam hal berbagai pengalaman, atau tempat untuk menuangkan peristiwa dalam perjalanan hidup seseorang adalah blog. Blog merupakan singkatan dari *web log* yaitu bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai *posting*) pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik (isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna

HOBİ DAN KOMUNITAS

internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.

Media blog *pertama kali* dipopulerkan oleh Blogger.com, yang dimiliki oleh Pyra Labs sebelum akhirnya diakuisisi oleh Google pada akhir tahun 2002. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog tersebut. Blog pada dasarnya adalah jurnal yang ada di web. Aktivitas *update*-nya disebut blogging dan seseorang yang “ngeblog” disebut blogger.

seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga blog yang bersifat sebaliknya (non-interaktif). Situs-situs web yang saling berkaitan berkat blog, atau secara total merupakan kumpulan blog sering disebut sebagai *blogosphere*.



■ Asad di Kawah Ijen, Banyuwangi

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh

Sedangkan komunitas blogger adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari para blogger berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan asal daerah, kesamaan kampus, kesamaan hobi, dan sebagainya. Para blogger yang tergabung dalam komunitas-komunitas blogger tersebut biasanya sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama-sama seperti kopi darat. Untuk bisa bergabung di komunitas blogger, biasanya ada semacam syarat atau aturan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk di komunitas tersebut, misalnya berasal dari daerah tertentu.

Salah satu komunitas blogger yang akan diulas pada tulisan ini adalah Komunitas Blogger Kepri dimana salah seorang anggotanya adalah pegawai Bea Cukai yang bertugas di Pangkalan Sarana Operasi Batam. Dia adalah **Agus Saputra**, yang biasa disapa temannya dengan panggilan **Asad**.



■ Asad Bersama Anak Pulau



■ Asad di Kapal Patroli

Ketertarikan Asad menulis di blog sudah dimulai pada tahun 2009 yang pada awalnya hanya sekedar ingin memiliki kenang-kenangan pada saat dia melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu tempat yang dianggap bagus. “Supaya ada kenangan, awalnya saya coba-coba menulis seadanya di blog, lama-kelamaan ternyata ada kepuasan tersendiri dan menjadi hobi yang sulit untuk ditinggalkan,” kata Asad yang sampai saat ini sudah menulis ratusan judul tulisan dari berbagai pengalaman di blog pribadinya.

Sejak Asad mendapatkan kepuasan tersendiri dalam hal tulis-menulis di blog, dia pun mulai tertarik dengan hobi *travelling*. Berbagai lokasi wisata di sekitar Kepulauan Riau dia kunjungi dan dituangkan dalam bentuk tulisan sederhana di blog pribadinya. Bahkan sejak tahun 2010, Asad mulai menggeluti hobi barunya ini dan bergabung dengan beberapa komunitas *travelling* seperti grup Batam Traveller (grup jalan-jalan), Anak Pulau (grup explore pulau), Backpacker Indonesia (*travelling* dalam negeri), dan Backpacker Dunia (*travelling* ke luar negeri).

Ditanya mengenai *travelling* ke luar negeri, Asad menjatuhkan pilihan pertamanya untuk mengunjungi negara tetangga terdekat Singapura. “Mengapa saya memilih ke Singapura? Karena saya tinggal di Batam, jadi ke Singapura itu mudah dan tiketnya murah,” papar Asad yang berpenampilan sederhana dan mudah senyum itu.

Pegawai pelaksana bagian pengadaan barang di PSO Batam ini benar-benar harus pintar mengatur waktu sedapat mungkin antara menjalankan hobinya sebagai penulis dan *travelling* dengan tugas dan tanggung jawabnya di kantor. “Saya harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pegawai Bea Cukai yang paling utama, dan kalau ada waktu libur dan cuti baru saya manfaatkan untuk





■ Maya Bay, Thailand



menjalankan hobi saya,” jelas Asad ketika ditanya bagaimana dia membagi waktu.

Asad dari kecil tinggal di Batam yang merupakan sebuah pulau kecil dimana ujung ke ujung pasti ketemu pantai. Situasi ini membuat dirinya sering mengunjungi pantai. Mungkin karena sering ke pantai, sehingga kalau *travelling* dia lebih suka memilih jalan-jalan ke alam terbuka seperti dataran tinggi, ia ingin suasana yang berbeda. Sedangkan kalau ke luar negeri, dia lebih suka mengunjungi dan melihat-lihat kehidupan sehari-hari di kota atau *city tour*, dari mulai mengunjungi museum atau pusat perbelanjaan, namun sekadar melihat-lihat saja, karena dia tidak terlalu hobi kalau untuk berbelanja.

Setelah menuangkan ratusan judul tulisan di blog pribadinya serta mengunjungi tempat wisata di berbagai lokasi di dalam maupun luar negeri, ada satu tulisan yang membuat hati Asad terkesan yaitu tulisan tentang “Penambangan Belerang di Kawah Ijen.” Bagaimana tidak, Asad merasa takjub bercampur sedih melihat perjuangan para penambang-penambang belerang yang harus berjalan berjam-jam mendaki gunung dan turun naik kawah untuk memikul belerang, dan hanya dibayar dengan upah yang rendah.



■ Mount Cook, New Zealand



■ Taj Mahal, India

Dari pengalaman ini, Asad mendapat satu pelajaran berharga bagaimana sulitnya menghidupi keluarga untuk mencari sesuap nasi, dan sebaliknya bagaimana perilaku manusia memperlakukan alam sekitarnya terutama sumber daya alam dengan semena-mena sehingga dapat merusak lingkungan dan ekosistem alam.

Kepuasan tersendiri semakin lengkap bagi Asad ketika tulisan tentang penambang belerang di Kawah Ijen ini juga sempat dimuat di surat kabar lokal yaitu Harian Batam Pos edisi *travelling* dan Tribun Batam. Asad mengakui bahwa dari berbagai tulisannya bukan hanya dimuat di blog pribadi, tetapi dia juga menggunakan berbagai media sosial lain, seperti facebook, twitter, instagram serta google supaya pembaca dapat membaca tulisannya dengan lebih leluasa.

Selain itu, menurut Asad, ada satu tulisan perjalanan *touring* di blog pribadinya yang mendapat respon cukup baik dari pembaca, yaitu perjalanan ke Pekanbaru. Untuk mengisi libur panjang, suatu ketika, dia beserta tiga orang temannya sengaja melakukan perjalanan dari Batam ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor. Baru enam bulan tulisan ini dia muat dalam blog, *viewer*-nya sudah mencapai 20 ribu. "Kalau mau menyeberangkan motor dari Batam ke Sumatera kan termasuk susah, harus ke Karimun dulu baru ke Buton. Tulisan perjalanan unik seperti ini banyak yang



■ Rainbow Bridge di Pulau Odaiba, Tokyo-Jepang

butuh informasinya,” papar anak muda yang menginginkan pendamping hidupnya kelak punya hobi *travelling* juga, supaya hobi yang digelutinya itu dapat berkesinambungan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Asad terus menggeluti hobinya dan sejak tahun 2011 dia mulai bergabung dengan grup Blogger Batam dimana salah satu anggotanya pada saat itu pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Batam (Ria Saptapika). Pada saat itu, banyak kegiatan sosial yang dilakukan grup ini yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk mengembangkan pariwisata Batam. Namun saat ini kegiatan grup Blogger Batam semakin meredup dan mati suri.

Mulai tahun 2015 Asad tidak mau kehilangan komunitasnya, dia mulai bergabung dalam grup Blogger Kepri sampai saat ini. Grup Blogger Kepri ini sangat aktif mulai dari acara kumpul-kumpul hingga undangan-undangan dari berbagai acara seperti acara di Kementerian Pariwisata Kepri, pembukaan hotel baru, dan restoran. Bahkan pada Oktober 2016 grup Blogger Kepri telah berhasil menerbitkan satu buku berjudul “Jelajah Kepri” yang berisi tentang catatan para blogger.

Buku ini mengulas tentang ragam tempat wisata yang ada di Provinsi Kepri, sebuah provinsi maritim di negeri ini yang terdiri atas gugusan kepulauan, yang terdiri atas tujuh

wilayah kabupaten/kota yaitu kota Tanjungpinang, Batam, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, dan Natuna. Provinsi bergelar Bunda Tanah Melayu ini didominasi wilayah laut 96 persen dan daratan 4 persen.

Ragam tempat wisata dibahas detail dalam buku ini, mulai dari wisata pantai, gunung, sejarah, hingga melihat langsung adat dan kebiasaan masyarakat di suatu pulau. Letaknya yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia menjadi nilai tambah bagi potensi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Apalagi Batam merupakan gerbang utama bagi wisatawan yang hendak memasuki wilayah Kepri. Menurut catatan, Kepri berada di peringkat ketiga sebagai provinsi dengan kunjungan wisman terbanyak setelah Jakarta dan Bali.

Buku hasil karya para anggota Blogger Kepri dengan tebal 164 halaman itu, memuat sebanyak 35 judul tulisan. Dimana Asad sebagai salah satu anggota Blogger Kepri tidak mau ketinggalan, dalam buku ini dia menyumbangkan satu tulisan berjudul “Pulau Berhala, Ketemukan Kepingan Surga di Sana”. Secara umum dari segi kualitas isi buku ini sudah menarik, hanya disayangkan masih dicetak dalam bentuk hitam putih sehingga foto-foto eksotis hasil jepretan kamera para blogger yang begitu indah menjadi kurang hidup.



■ Mount Cook, New Zealand



■ Buku Hasil Karya Blogger Kepri



■ Grup Backpacker Dunia di Batam

Menurut Asad, anggota Blogger Kepri sudah mencapai 300 orang, tetapi yang aktif di Batam ada sekitar 100 anggota, terdiri dari pria dan wanita berbagai kalangan dan profesi, mulai dari pegawai, wartawan, karyawan swasta, dan wiraswasta. Setiap minggu ada saja pertemuan antar anggota. Topik bahasan juga bermacam-macam, bahkan sering mengadakan *workshop* dengan mengundang pembicara, misalnya tentang bagaimana cara menulis dan tata cara

bahasa yang baik di blog. Namun sayang, anggota Blogger Kepri hanya Asad sendiri yang bekerja di Bea Cukai.

“Kalau *travelling* banyak teman-teman dari Bea Cukai, bahkan sering bertemu secara kebetulan di suatu tempat, tetapi kalau yang hobi untuk menuliskan perjalanannya masih jarang saya temukan. Ada satu teman dari Medan tetapi saya lupa namanya. Dia juga sudah menerbitkan buku,” jelas Asad sambil bercanda.

Asad, yang merupakan anak ketiga dari enam bersaudara itu berharap kedepannya ada komunitas blogger sesama teman pegawai Bea Cukai yang membahas satu hobi atau topik tertentu sehingga terjalin komunitas dan kebersamaan antar generasi. Suatu saat nanti, Asad juga berkeinginan untuk menerbitkan buku dari hasil tulisannya sendiri yang tujuannya bukan untuk komersil akan tetapi sebagai kenangan tersendiri dan bisa *travelling* keliling Indonesia dan keliling dunia.

(Piter)

INI STETOSKOP CETAK 3D UNTUK GAZA



Seorang dokter Kanada-Palestina menciptakan stetoskop cetak tiga dimensi (3D) untuk sejumlah rumah sakit di Gaza. Biaya cetaknya hanya 36 ribu rupiah per stetoskop, dan ini merupakan hadiah berharga bagi para dokter yang sering kali kekurangan peralatan medis dasar.

Sejumlah rumah sakit di Gaza memang telah lama berjuang untuk terus bertahan. Sejak kelompok militan Hamaz mengambil alih jalur Gaza pada tahun 2007, dan Israel serta Mesir memberlakukan blokade di wilayah tersebut, rumah-rumah sakit di Gaza kekurangan obat-obatan dan peralatan medis. Untuk membantu mengatasi masalah ini, Tarek Loubani menciptakan stetoskop berbiaya murah dengan menggunakan mesin cetak 3D.

Dokter Tarek mengaku gagasan untuk memproduksi peralatan medis murah ini muncul saat ia sedang bekerja di rumah sakit Al-Shifa, dalam konflik antara Israel dengan Gaza tahun 2012.

“Saat itu, kami sangat kekurangan peralatan medis, sehingga untuk mendengarkan paru-paru pasien pun, kami harus menempelkan telinga di dada mereka. Ini tak bisa diterima. Ini takkan bisa diterima di Kanada, juga Gaza,” ujarnya. Ia mengaku terinspirasi untuk membantu pasiennya, saat ia menemukan stetoskop mainan yang biasa dipakai oleh anak-anak dalam bermain dokter-dokteran.

“Saat saya kembali ke rumah, memikirkan semua masalah ini, saya melihat mainan stetoskop kecil milik keponakan saya. Saya sadar, stetoskop yang ongkos produksinya sekitar 14 ribu rupiah ini tak buruk. Dari situlah ide



membuat stetoskop plastik ini muncul. Namun ini dibuat dengan baik, sehingga kualitasnya sebaik stetoskop berkualitas tinggi di pasaran. Kami telah menguji dan mengesahkan, bahwa ini sama bagusnya dengan stetoskop lain,” imbuhnya lagi.

Dalam sebuah fasilitas produksi sementara di Gaza, sebuah mesin cetak 3 D berukuran kecil sibuk memproduksi sebuah komponen stetoskop. Mesin cetak sederhana ini bisa dipakai untuk membuat stetoskop yang murah namun berfungsi dengan baik untuk staf medis di seluruh dunia.

“Apa pun yang bisa saya perbaiki, akan saya perbaiki. Masalah kekurangan

alat, terutama stetoskop dan beberapa peralatan dasar lain, bisa kita ubah menjadi kemenangan besar bagi kita di Gaza, untuk membantu pasien Gaza, dan agar pasien di area miskin lain di dunia bisa mendapatkan perawatan yang terbaik,” tegasnya.

Salah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Al-Shifa, dr. Ayman Sahabani menyambut baik ide pembuatan stetoskop ini, pasalnya saat ini harga stetoskop yang paling murah di pasaran umumnya seharga 735 ribu rupiah. “Stetoskop buatan Dokter Tarek ini sederhana, murah, dan memenuhi kebutuhan kami di bagian penerimaan dan unit gawat darurat (UGD). Kini



kami bisa menyediakan satu stetoskop untuk setiap dokter,” ujar dr. Ayman.

**(Ariessuryantini,
dari berbagai sumber).**

QUANTIFYING THE IMPACT OF TRADE FACILITATION IN INDONESIA

Author: Fardhani Hamiputri Akhzan

Indonesia, Directorate General of Customs and Excise, The Ministry of Finance

Research Advisor: Irwanda Wisnu Wardhana, S.ST, Akt., M.PP, Ph.D

The Government of Indonesia is experiencing difficulties in assessing its trade facilitation efforts. There are three main problems faced by the policymakers: defining and measuring trade facilitation; choosing a modeling methodology to estimate the importance of trade facilitation for trade flows; and designing a simulation scenario to estimate the effect of improved trade facilitation on trade flows. This paper offers solutions to those problems.

1. Defining And Measuring Trade Facilitation

The term of trade facilitation in this paper is the eradication of indirect nontariff barriers and including environment in which transactions take place, transparency and professionalism of customs and regulatory environments, as well as the harmonization of standards and conformance with international or regional regulations.

This paper examines Indonesia as the center of observation with ten trading partners as the exporting countries are: China, Singapore, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Thailand, United States, Hong Kong, Australia, and Germany. In addition, the ten trading partners as the importing countries are: Japan, China, Singapore, United States, India, Republic of Korea, Malaysia, Hong Kong, Thailand, and Australia.

In order to define and measure trade facilitation, this paper uses four indicators (port efficiency, customs environment, regulatory environment, and e-business usage) rather than a single parameter to proxy trade facilitation, such as import prices, international transport costs, or productivity of the transport sector. The inputs for each indicators are listed below.

1. Port efficiency: Ports (Global Competitiveness Report); Air transport (GCR)
2. Customs environment: Irregular payment (GCR); Import fees (GCR); Trade barriers (GCR); Ethical behaviour (GCR); Corruption Perception Index (Transparency International)
3. Regulatory environment: Burden of government regulations (GCR); Transparency of government policymaking (GCR); Favoritism in decision of government officials (GCR); Judicial independence (GCR)
4. E-business usage: percentage of individuals using internet (GCR)

The indicators are constructed with multiple data inputs to reduce dependence on any one-survey. The inputs consist of actual value and survey value with different range of response. To put these values into a comparable basis, all countries raw data values are averaged. Then, each country specific observation raw data is indexed to the average, hence the output become an indexed input. An indexed input for a country is constructed as $\bar{I}_i = I_i / (\sum_{j=1}^{110} I_j / 110)$ where I_i . The next step is averaging all indexed inputs for every country per year using simple average.

There are ten supporting variables which are taken into the account of examining the relationship between trade facilitation and trade flows, listed below.

1. Trade data (bilateral trade flows of manufactured goods), from WITS on TRAINS, is the value of imports of the corresponding product category in accordance with 97 two-digit levels of HS Code. This variable is used to capture trade flows.
2. Tariff. Averaged applied tariff (in percentage) are used, weighted by the values of bilateral trade. Specific for every country with its partner. This variable is used to capture trade barrier.
3. Gross National Income (GNI) comes from the World Bank's World Development Indicators. The data are in constant 2010 U.S. dollars. This variable is used to represent economic development.
4. Geographic distance between capital cities of origin country and destination country. The data is in kilometers. This variable is used to capture transport cost.
5. Dummy variable for trade arrangements. The form of trade arrangements as dummy variables is to reveal the existence of regional trade agreements. Dummy variable for language and adjacency. These dummy variables are used to capture information cost, trade cost, and information cost.

2. Modeling Methodology: The Gravity Model

The econometric model (using the gravity model analysis) is adapted from the research of Wilson, Mann, and Otsuki (2003). The basic structure of the specific gravity equation used in this research is:

$$\ln(V_{ij}^t) = b_1 \ln(100 + TARIFF_{ij}^t) + b_2 \ln PE_i + b_3 \ln CE_i + b_4 \ln RE_i + b_5 \ln EB_i + b_6 \ln(GNI_i^t) + b_7 \ln(GNI_j^t) + b_8 \ln(DIST_{ij}) + b_9 \ln D_{IIEPA} + b_{10} \ln D_{ACFTA} + b_{11} \ln D_{ASEANFTA} + b_{12} \ln D_{ENG} + b_{13} \ln D_{MALAY} + b_{14} \ln D_{ADJ} + e_{ij}^t$$

- b** terms are coefficient
- i** is the importer and **J** is the exporter
- t** is trading years
- V_{ij}^t** is the value of manufactures exports from country J to country I
- TARIFF_{ij}^t** is weighted average applied tariff specifics to trading partner *I* and *J* in the year *t*
- PE_i** is *I*'s indicators of port efficiency
- CE_i** is *I*'s indicators of customs environment
- RE_i** is *I*'s indicators of regulatory environment

- EB_i** is *I*'s indicators of e-business usage
- GNI_i^t** is Gross National Income of *I* in the year *t*
- GNI_j^t** is Gross National Income of *J* in the year *t*
- DIST_{ij}** is geographic distance between capital cities *I* and *J*
- D_{IIEPA}**, **D_{ACFTA}**, and **D_{ASEANFTA}** are the dummy variables for trade arrangements
- D_{ENG}** and **D_{MALAY}** are the dummy variables for language
- D_{ADJ}** takes the value of 1 if country *I* shares a land border with country *J* and 0 otherwise
- e_{ij}^t** is the error term

The gravity model result for regression of trade flows on trade facilitation indicators and other standard variables is presented by Table 1 below.

Table 1. Regression Result (Random Effect Model)

Variable	Coefficient
Constant	6.2961
Tariffs	-1.1445
Port efficiency	1.1464*
Customs environment	1.1337***
Regulatory environment	-0.6782
E-business usage	0.0940
GNI of Importer	0.3189***
GNI of Exporter	0.2481***
Geographic distance	0.2338
IIEPA membership dummy	0.8829*
ACFTA membership dummy	1.7710**
ASEANFTA membership dummy	-1.4119
English language dummy	1.0225*
Malay language dummy	1.7689***
Number of observation	200
Adjusted R-squared	0.5474

Source: Author's computation based on data from indicated sources using Stata.

Port efficiency (1.1464) has the largest elasticity among the trade facilitation indicators, suggesting that the greatest gains to the trade flows of Indonesia's group of trading partners would come from improvement in this area. Customs environment (1.1337) is positively associated with the trade flows, but the coefficient is not as large as port

efficiency. Equal-sized enhancement in customs environment will complement port efficiency enhancement and the additional effect would be almost as enormous as port efficiency enhancement effect. This finding may be useful for the GoI which put much attention on dwelling time of port due to the high logistic cost of import goods in Indonesia. The effort to minimize the dwelling time should not only be focused on port infrastructure, but also on the customs environment involved in the port. The range of potential for country performance in the area of customs environment is the largest suggesting opportunities in some countries for great improvements in this area.

Regulatory environment (-0.6782) has a negative and significant effect on trade flows. To the extent that regulations are used as border barriers, reducing these regulations will be positively associated with the increased trade flows.

E-business usage (0.0940) has a positive, but not significant, effect on trade flows. The best presumption to explain this anomaly is the implication of using PT EDI services in Indonesia restricting the access of e-commerce. Even so, the GoI will not compromise the security of e-business network only for the sake of increasing trade flow.

3. Simulation Design

The goal of this simulation is to identify improvements that bring Indonesia halfway to the trading partners best practice economy because it is not realistic to presume a scenario in which Indonesia achieves best practice as measured by the country with the highest score on a particular measure of trade facilitation. The simulation result is presented in Table 2 below.

Table 2. Overview of Simulation: Halfway to The Best Practice Economy

Trade facilitation measure	Goal	Change in trade flow	
		Amount (US\$)	Share of total trade (%)
<i>Border measures</i>			
Port efficiency	Bring Indonesia up to the best practice economy	\$567,640,564,428	32.72%
Customs environment	Bring Indonesia up to the best practice economy	\$460,219,082,149	26.53%
<i>Behind-the-border measures</i>			
Regulatory environment	Bring Indonesia down from the best practice economy	\$454,760,211,301	26.21%
E-business usage	Bring Indonesia up to the best practice economy	\$252,143,314,630	14.53%
Total		\$1,734,763,172,508	174.53%

Source: Author's computations based on survey data for trade facilitation indicators and indicated sources.

The largest increase on the group trade derived from improved port efficiency is due partly to the large coefficient on the relationship between trade and port and airport infrastructure and partly to the broad room for improvement in Indonesia. This scenario suggests that the attention devoted by the GoI policymakers on improvement in port efficiency is warranted.

The simulation result suggests that the policymakers of GoI should consider allocating its resources on the improvement

of port efficiency area to gain the greatest increase in trade flows. The improvement in customs environment could be the next priority once the port and airport infrastructure are improved.

The implication of trade flows increase from trade facilitation improvement has an enormous impact on government revenue as provided in Table 3.

Table 3. Simulation Result: Increase in Government Revenue

Trade facilitation measure	Change in trade flow	Change in government revenue	
	Amount (US\$)	Increase in Customs Import Duty (US\$)	Increase in Import Duty (US\$) Value Added Tax Income Tax
Port efficiency	\$567,640,564,428	27,133,218,980	77,320,591,843 29,738,689,170
Customs environment	\$460,219,082,149	21,998,472,127	62,688,282,056 24,110,877,714
Regulatory environment	\$454,760,211,301	21,737,538,100	61,944,707,422 23,824,887,470
E-business usage	\$252,143,314,630	12,052,450,439	34,345,449,459 13,209,788,253
Total	\$1,734,763,172,508	\$82,921,679,646	\$236,299,030,780 \$90,884,242,608

Source: Author's computations.

4. Conclusions

The key innovation of the approach used in this research is centering the observation on trade facilitation indicators and designing simulation suited to policymaking. Concurrently, trade facilitation indicators (i.e. port efficiency, customs environment, regulatory environment, and e-business usage) of each country comprehend the multiple approaches to exhibit modern international commerce. The simulation analysis of Indonesia considers the restricted resources the country, thus designed as realistic as possible. The improvement of each indicator is assumed to be halfway to the best practice of the trade group contemplating that it is too much burden for Indonesia to be at the same level of the best practice economy in instance.

Examined apart from any model estimation of their effect on trade, the summary of indicators help the Gol policymakers to judge where their economy stands relative to their trading partners on each of these measures. Quantifying the benefits of trade facilitation efforts, the multiple-indicator approach and realistic simulation design, along with disintegration of the impact of the each indicators on trade, may

capacitate more targeted decision-making by policymakers. Measuring port efficiency, customs environment, regulatory environment, and e-business usage as trade facilitation indicators and deploying them into the gravity modeling approach offers policymakers more information. It is useful in determining which trade facilitation efforts might provide the greatest benefits in terms of increasing trade flows and government revenue. While it can not be denied that a comprehensive efforts generate the largest increase in trade, consideration of different kinds of trade facilitation and of disaggregated trade flows could be useful for targeting policy efforts and launching pilot projects in capacity building.

In summary, this research is able to provide the answers of the research questions stated at the beginning of the paper. First, trade facilitation has a significant impact on trade flows of Indonesia and its trading partners. Second, Indonesia should improve the port efficiency and customs environment area to optimize the potential benefits from trade facilitation and to gain the greatest increase in government revenue.

DONGGALA, SISA KEJAYAAN MASA LAMPAU



Yang saya sukai dari penugasan kantor adalah bila berkunjung ke kota lain yang belum pernah dikunjungi sebelumnya terlebih punya waktu luang untuk sekadar berjalan-jalan dan tentu saja ada yang bertindak sebagai pemandu. Plus sopir. Kunjungan saya ke Donggala (sekitar 30 km dari Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah) kali ini merupakan *side effect* dari penugasan meliputi profil Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Pantoloan, Oktober 2014.

Penuturan salah seorang kawan yang bertugas di PSO Pantoloan bahwa railing balkon bekas kantor di Donggala masih bertuliskan 'douane' sangat menarik untuk dilewatkan. Benar saja, di sana saya menjumpai sebuah kantor Bea Cukai berdiri di antara pergudangan di kawasan pelabuhan yang meskipun tidak terpakai namun masih dirawat dengan baik. Gedung yang direnovasi pada tanggal 11 Desember 1967 ini masih menyisakan ornamen yang jelas menandakan identitas *Douane*. Bagi orang awam tentu akan bertanya bagaimana instansi Bea Cukai berada di pelabuhan yang kini nyaris tak ada aktivitas tersebut.

Merasa tertarik, saya pun mencoba untuk mencari lebih dalam sejarah Donggala. Embrio kota ini bermula dari tempat tambat bagi perahu nelayan dan tempat persinggahan bagi kapal-kapal tradisional untuk mengisi perbekalan air tawar. Dalam perkembangannya pelabuhan ini semakin ramai dikunjungi kapal-kapal niaga dan tercatat bahwa pada tahun 1430 pelabuhan Donggala di bawah Kerajaan Banawa dikenal sebagai pelabuhan yang memperdagangkan hasil bumi seperti kopra, damar, kemiri dan ternak sapi. Hingga akhirnya VOC menguasai





Indonesia pelabuhan ini semakin ramai terlebih saat booming komoditi kopra pada tahun 1920 hingga 1939.

Kebesaran nama Pelabuhan Donggala turut menginspirasi setidaknya dua penulis besar dalam karya mereka. Dalam buku *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* milik Buya Hamka, dan *Tetralogi Pulau Buru* milik sastrawan Pramoedya Ananta Toer, kedua buku itu menyebut nama Donggala disebut sebagai tempat singgah para pelaut nusantara dan mancanegara.

Posisinya yang strategis berada di tengah-tengah jalur perdagangan Selat Makassar yang saat itu menjadi jalur utama kapal-kapal menuju Eropa selain Selat Malaka menjadikan Donggala sebagai titik penting bagi VOC dalam menancapkan kuku kekuasaannya. Sepeninggal VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menguasai penuh Donggala dimulai dengan cara memaksa Raja Banawa ke-VI, I Sandudongie, pada tahun 1824 untuk menandatangani berbagai kontrak

sehingga Belanda dapat membangun Kantor Douane dan berbagai fasilitas perkantoran dalam rangka memperlancar monopoli perdagangan dan kekuasaan segala hal. Pada 28 Agustus 1903, Belanda menempatkan Asisten Residen pertamanya, A.J.N. Engelenberg. Pada tanggal 1 April 1907 kebijakan tol (pemungutan kepabeanan) yang diperkirakan berupa pelaksanaan Undang-Undang Tarif mulai diterapkan di Donggala sebagai tata niaga perdagangan laut.

Dalam rentang waktu yang panjang tersebut tampak besarnya peranan Douane dalam mengatur arus barang di pelabuhan. Dari sekian banyaknya barang ekspor dan impor lainnya, tercatat kopra sebagai komoditi utama yang diperdagangkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga yang mengatur tata niaga kopra sejak Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga pemerintah Indonesia yang sekarang masih menyisakan bangunan sejarah, Yayasan Kopra Daerah (sebelumnya bernama Stichting Het Coprafonds).

Keberadaan kantor Bea Cukai Donggala sempat mewarnai perjuangan politik pergerakan kemerdekaan saat terjadi penolakan pendudukan Belanda yang diboncengi Sekutu/NICA, barisan Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) melakukan penurunan bendera merah-putih-biru milik pemerintah Hindia Belanda di halaman kantor pada tanggal 21 November 1945.

Masa redupnya Donggala adalah saat pelabuhan Pantoloan yang terletak di sisi seberang Teluk Palu mulai dibuka dan dioperasikan menjadi pelabuhan baru yang melayani kapal penumpang maupun barang pada tahun 1978. Pusat kota Donggala yang sebelumnya berada di pelabuhanpun sekarang telah bergeser hingga menyisakan kecantikan kota tua dengan kekhasan arsitekturnya. Dan hingga saat ini, pelabuhan Donggala menjadi pelabuhan rakyat di tengah-tengah sejarah kejayaannya di masa lampau dengan saksi bisu gedung-gedung tua di kawasan pelabuhan.

Pembebasan Bea Masuk Buku Ilmu Pengetahuan

Pertanyaan:

Nama saya Adam Amy dari Bogor ingin menanyakan apakah untuk importasi buku ilmu pengetahuan dapat dibebaskan dari Bea Masuk dan Pajak Impor? Terima kasih atas jawabannya.

Adam Amy, Bogor.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara Adam Amy di Bogor, Kami dari Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pertanyaan yang Saudara ajukan sebagai berikut:

Impor buku ilmu pengetahuan dibebaskan dari bea masuk (BM) dan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 22 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.04/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.011/2013. Hal tersebut ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-16/BC/2013 tentang Penegasan Pelayanan Importasi Buku Ilmu Pengetahuan, yang menyebutkan bahwa pembebasan tersebut berlaku juga untuk buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

Pembebasan BM diberikan terhadap impor buku ilmu pengetahuan yang meliputi buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. Dikecualikan dari buku yang diberikan pembebasan BM sebagaimana tersebut di atas, meliputi buku

hiburan, buku roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi suatu usaha, buku katalog di luar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku horor, buku komik, dan buku reproduksi lukisan.

Terhadap impor buku ilmu pengetahuan seperti tersebut di atas, diberikan pembebasan BM tanpa perlu mendapatkan persetujuan pemberian pembebasan BM dari Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Sementara terhadap impor buku-buku yang dikecualikan dari pembebasan BM, dipungut BM sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012.

Orang pribadi atau badan yang melakukan impor buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Buku-buku pelajaran umum seperti tersebut di atas merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepastakaan.

Sementara kitab suci yang dimaksud adalah kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran termasuk tafsir dan terjemahnya baik secara

keseluruhan maupun sebagian, dan Juz Amma. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kitab suci agama Katolik yang meliputi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kitab suci agama Hindu meliputi Weda, Smerti dan Sruti, Unpanisad, Itihsa, Purnama, termasuk tafsir dan terjemahnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kitab suci agama Budha meliputi Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahnya baik keseluruhan maupun sebagian. Juga kitab suci lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk.

Impor barang berupa buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang dibebaskan dari pungutan BM dan PPN, tidak dipungut pajak penghasilan (PPH) Pasal 22 dan tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPH Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Salam,

Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi
Direktorat KIAL



KONSEPSI REFORMASI



Inisiatif Strategis

Pengendalian titik rawan integritas

Revitalisasi budaya organisasi

Profesionalisme, Reward & Punishment

Standardisasi sarana prasarana

Reengineering Organisasi DJBC

Joint program DJBC-DJP

Intensifikasi & Ekstensifikasi Penerimaan

Integrasi Proses Bisnis & Utilisasi Database

Pemberian dukungan IKM

Pemberian fasilitasi tepat sasaran

Penyederhanaan perizinan fasilitas

Penguatan peran komunikasi dan citra Bea Cukai

Pengembangan otomasi pelayanan

Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi

Percepatan Pelayanan Impor & Ekspor untuk Perbaikan DT & EODB

Revitalisasi peran DJBC di Perbatasan

Revitalisasi sistem pengawasan KC

Pemantauan Pencetakan Pita Cukai

Revitalisasi peran & sinergi kantor vertikal

Quick Win

- 1 Piloting pengendalian titik rawan integritas
- 2 Penertiban Importir bermasalah
- 3 Penertiban Gudang Berikat & Kawasan Berikat
- 4 Rekonsiliasi data PIB dengan data SPT Masa Bulanan
- 5 Automated Monitoring Tools (filtering transaksi tidak wajar)
- 6 Single Identity (NIK, NPWP)
- 7 Penambahan perusahaan berstatus comply (MITA & AEO)
- 8 Piloting Otomasi Penutupan Manifest
- 9 Piloting Rekaman LHP fisik via HP/tablet (pelabuhan & kawasan berikat)
- 10 Otomasi pembekuan ijin pabrik rokok yang melakukan kegiatan ilegal (pemblokiran pelayanan pita cukai)
- 11 Piloting revitalisasi peran audit & sinergi antarunit Pusat dan Vertikal



Keindahan yang tersaji di atas meja sering kali luput dari pandangan. Cangkir kopi, pot bunga, serta pernik-pernik lain ternyata bisa disajikan menjadi suatu karya foto yang memiliki keindahan tersendiri bagi para penikmat foto-foto flatlay. Kesederhanaan dan sifatnya yang minimalis membuat foto-foto flatlay menjadi unik dan memiliki nilai estetika tersendiri.

Foto by: Jodi Umbara







KAMPUNG WISATA JODIPAN: NIKMATI MURAL DI PEMUKIMAN PADAT TENGAH KOTA MALANG

Buk Ma, seorang wanita paruh baya asal Madura yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional, tak pernah menyangka bahwa rumah yang ia tinggali selama puluhan tahun di sebuah pemukiman di Kota Malang, Jawa Timur bisa ramai dikunjungi wisatawan. Hanya bermodalkan kesanggupan untuk berkreasi mengecat

dinding luar rumahnya dan semangat untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, ia dan keluarganya menjadi bagian perubahan RW 2 Kelurahan Jodipan yang sebelumnya terkesan kumuh, menjadi Kampung Wisata Jodipan yang saat ini menjadi salah satu tujuan pariwisata di Kota Malang.

Bersama dengan 106 rumah warga lainnya, rumah Buk Ma berada di gang sempit di dalam kampung yang berada di bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas. Awalnya, tak ada yang istimewa dari kampung ini, hanya berupa pemukiman padat di pinggir sungai yang bahkan warganya pun tak hidup dengan kondisi ekonomi dan sanitasi yang baik. Buk Ma dan warga lainnya





Awalnya, tak ada yang istimewa dari kampung ini, hanya berupa pemukiman padat di pinggir sungai yang bahkan warganya pun tak hidup dengan kondisi ekonomi dan sanitasi yang baik.

terbiasa membuang sampah rumah tangga, juga melaksanakan mandi, cuci, kakus di sungai. Namun, semuanya berubah ketika sekelompok mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang tergabung dalam Kelompok Guyspro, menyambangi kampung ini.

Seperti dikutip dari bbc.com, para mahasiswa tersebut ingin mengubah perilaku warga di bantaran sungai yang membuang sampah ke sungai. Jodipan dipilih lantaran memiliki lanskap yang bagus bila dilihat dari jembatan Jalan

waktu masih menunjukkan pukul 8 pagi di hari kerja. Tapi ternyata, kenyataan ini tak menghentikan animo masyarakat untuk mengunjungi KWJ yang terletak di Desa Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sekitar 500 meter dari Stasiun Kota Malang. Bagi pengunjung yang naik kendaraan umum, untuk mencapai KWJ bisa menggunakan becak atau mobil angkutan dengan rute ABG/ABH, AJG/AJH, AMG/AMH, atau MT. Bingung? Nah, ternyata di Malang semua rute angkutan umum ditulis dengan singkatan, unik ya! Kesemua angkutan



ini melewati Jembatan Brantas, Jalan Gatot Subroto, menuju KWJ.

Sesampainya saya di Jodipan, area parkir mobil dan motor di pinggir jalan, yang dipenuhi para pedagang loak, sudah banyak terisi. Warga Jodipan lah yang bertanggung jawab mengurus area ini, berikut memungut retribusi parkir dan tiket masuk. Tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp2.000, mobil Rp5.000, dan bus pariwisata Rp25.000. Adapun tiket masuk

untuk tiap pengunjung adalah Rp2.000. Memang, berdasarkan pengakuan Buk Ma yang saya wawancarai, warga Jodipan, selain telah setuju membangun daerahnya, juga ikut serta dalam mengurus tetek bengek administrasi demi keberlangsungan KWJ ini. Uang retribusi tersebut dikumpulkan warga untuk membiayai keamanan dan kebersihan kampung. Selain itu, warga juga sedikit demi sedikit telah merubah kebiasaan buruk bertahun-tahun. Saat





ini, di Jodipan sudah ada kamar mandi umum dan petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah warga setiap harinya, jadi tak akan kita temui sampah yang berserakan di jalanan atau dibuang ke sungai. Hal ini tentunya menambah kenyamanan dan memberi kesan baik bagi para wisatawan yang berkunjung.

Benar saja, ketika memasuki kawasan ini, kalimat seorang penulis dan penyair Irlandia, Oscar Wilde seakan beresonansi di dalam hati saya. "Mere colour, unspoiled by meaning and unallied with definite form, can speak to the soul in a thousand different ways". Warna-warna yang memenuhi KWJ seketika membuat bahagia, apalagi tak henti-hentinya saya dan banyak pengunjung lain terkesima dengan kreasi warna yang ditawarkan.

Di sana, saya menjumpai pemandangan yang sama di setiap sisi kampung ini, yaitu para pengunjung yang asik berswafoto dengan latar belakang dinding-dinding rumah penduduk yang dicat berwarna-warni. Tiap rumah seakan menawarkan konsep latar belakang foto yang berbeda. Ada dinding yang digambar dengan mural-mural tiga dimensi, layaknya di Museum Alive Ancol, lorong gang yang langit-langitnya dihiasi dengan payung berwarna-warni, teras-teras rumah yang khusus disediakan untuk berfoto dengan segala macam properti seperti topi cacing, dan banyak lagi bentuk kreatifitas warga yang memanjakan mata pengunjung.

Selain yang telah saya sebutkan, ada beberapa tempat lagi yang menjadi favorit para pengunjung untuk berfoto. Pertama, di Jembatan Embong Brantas di mana view cantik KWJ akan terlihat dari atas jembatan. Kedua, di tangga warna-warni sebelum gerbang keluar KWJ yang cocok untuk foto berkelompok, dan terakhir, ada sebuah lapangan di pinggir Kali Brantas yang sudah disulap menjadi kafetaria





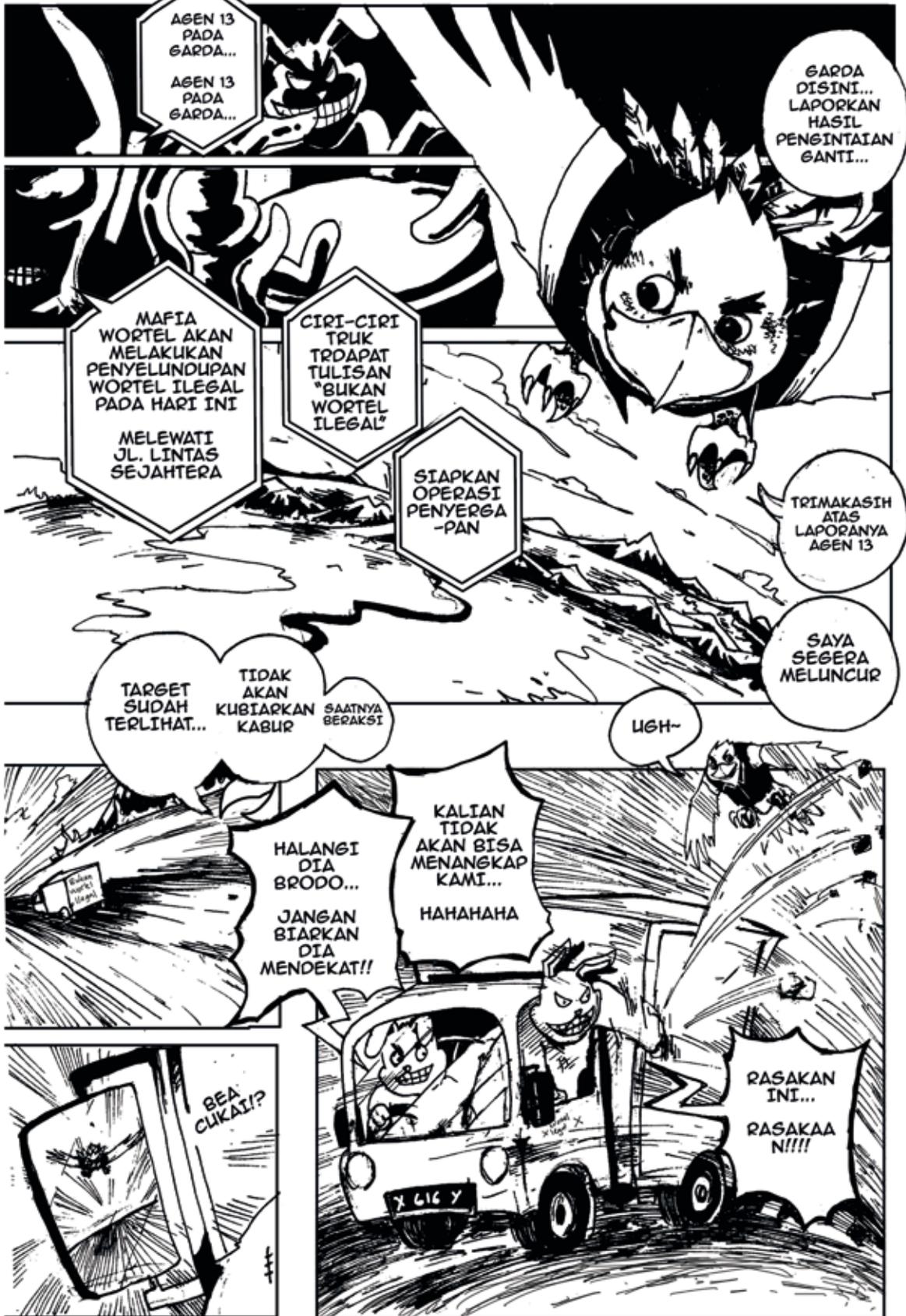
kecil dan dihiasi tanaman rambat *artificial* di langit-langitnya.

Tak perlu khawatir jika kita ke Jodipan dan tak membawa bekal. Banyak warga, khususnya para ibu rumah tangga, yang membuka warung di rumahnya, menjajakan makanan dan minuman ringan. Salah seorang ibu bertutur bahwa hal ini turut membantu perekonomian keluarganya. Sebelum menjual makanan dan minuman, para ibu di sana umumnya hanya bekerja sebagai buruh cuci, pemasang payet, atau menjadi pemijat tradisional seperti Buk Ma. Sekarang, selain sibuk melayani kebutuhan makan dan minum pengunjung KWJ, mereka juga dengan ramah menyapa pengunjung, menunjukkan jalan dan tempat favorit untuk berfoto, serta bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan.

Bagi yang belum puas berfoto di KWJ, mungkin bisa menyebrangi jembatan dan mengunjungi kampung di seberang sungai, yang menawarkan sensasi berbeda dimana seluruh rumah secara konsisten digambar dengan lukisan tiga dimensi, membawa imajinasi kita menjadi lebih hidup. Hal ini pula yang menjadikan warga sekitar menjuluki kampung ini dengan sebutan Kampung 3D, dan ternyata keberadaan Kampung 3D digagas oleh pemerintah Kota Malang.

Tak terasa, matahari semakin terik, kunjungan di KWJ pun harus segera berakhir. Sebagai bahan pertimbangan jika ingin berkunjung, waktu yang paling cocok untuk mengambil foto ialah pagi mulai pukul 06.00 hingga 10.000, dan sore hari saat pukul 15.00 hingga 17.00. Selamat berkeliling!

CH.2 GARDA KULON, DAN KELINCI PEMAŠOK WORTEL ILEGAL



Pengirim Rubrik Ragam:
A. Mukhlis Lutfi S.
Pelaksana KPPBC TMP C Tembilaan



Heri Loveya Kesempatan bertambah lg bagi sang petugas, utk lbh byk lg mengumpulkan hsl rampasan. Id memang lbh lbh baik langsung dibuang sendiri jgn ksh ke petugas. hancurin sj brg2 itu di dpn petugas. krn bkn tdk mungkin. brg sitaan akan berguna bg mrk yg menerikkan aturan. tdi hanta trs terindas.

Like · Reply · Message · May 27 at 8:18am

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Untuk produk minuman, atas kelebihannya langsung dimusnahkan didepan pemilik barang dengan cara dibuang isinya ketempat sampah, untuk produk tembakau dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ngomong ngomong aturan ini berlaku umum ya, BUKAN hanya ke TKI, jadi salah alamat kalau anda mengatasnamakan TKI 😊

Like · Reply · Commented on · (P) · May 27 at 8:04am

Nancy M. Pasaribu Betul itu. ikuti aturan emang susah ya? Makanya jgn suka berburuk sangka dulu. Dibaca, didengar & dimengerti yah, baru ngomong.

Like · Reply · Message · June 1 at 6:31pm

Blanda Bugyeong maaf paibu...seumpama bawa ginseng yang kaya gini maksimal berapa botol ya paibu ???...mohon penjelasannya trima kasih banyak.



Like · Reply · Message · 1 · May 12 at 8:26am

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1 liter per penumpang dewasa sisanya akan dimusnahkan ya. 😊

Like · Reply · 2 · Commented on by · (P) · May 12 at 8:29am

Blanda Bugyeong oh makasih atas informasinya paibu...semoga sukses slalu Aminnn.

Like · Reply · Message · May 12 at 8:31am

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Blanda Bugyeong Aamiin, Sukses selalu juga untuk Anda dan keluarga. Salam untuk teman2 ya. 😊

Allan Embun Klu bawa ginseng korea sama sojunya dan HP boleh ega pak

Like · Reply · Message · May 11 at 10:57am

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Impor hp dibatasi oleh Kemendag paling banyak 2 unit per penumpang dan kondisi harus baru.

Ginseng dalam bentuk minuman? Jika iya, diperbolehkan maksimal 1 liter per penumpang dewasa. Atas kelebihannya akan dimusnahkan. 😊

Allan Embun Klu bawa ginseng korea sama sojunya dan HP boleh ega pak

Like · Reply · Message · May 11 at 10:57am

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Impor hp dibatasi oleh Kemendag paling banyak 2 unit per penumpang dan kondisi harus baru.

Ginseng dalam bentuk minuman? Jika iya, diperbolehkan maksimal 1 liter per penumpang dewasa. Atas kelebihannya akan dimusnahkan. 😊

Like · Reply · Commented on · (P) · May 11 at 12:27pm

Fendy D Ace Cara hitung biaya cukai barang bawa an gmn yah?. Misal ny barang yg 10kg jadi harus byr brp??

Like · Reply · Message · May 12 at 11:00am

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jika barang tersebut Anda bawa maka atas kelebihan USD250 yang akan dipungut bea masuk dan pajak impor. Untuk informasi lebih lanjut kami sarankan hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 atau email ke info@customs.go.id. 😊

Like · Reply · Commented on · (P) · May 13 at 6:09am

Laras Babon Pak bawa anak ayam hidup boleh idk. 😊 dan kerbau sbab saya ada banyak

Like · Reply · Message · May 11 at 10:01pm

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jangan bawa kerbau mda, kasihan penumpang lainnya. 😊

Like · Reply · Commented on · (P) · May 11 at 10:20pm

Riko Alberto Manurung Saya Riko Alberto warga Kota Tanjungpinang ibukota Provinsi Kepri, Batam juga merupakan salah satu kota yang secara administratif bagian dari Provinsi Kepri. Saya patut bangga dan apresiasi kinerja Bea Dan Cukai Batam atas keberhasilannya mengungkap penyeludupan sabu masuk ke Batam, luar biasa keren... Bagaimana ya caranya untuk buat laporan secara resmi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bila ada temuan penyeludupan antar negara yang masuk ke wilayah Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang..?

Like · Reply · Message · 2 · May 4 at 3:54pm

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Silakan informasikan dugaan pelanggaran tersebut melalui telepon 1500225 atau email ke info@customs.go.id.

Kami tunggu informasi Anda.

SUKA BEPERGIAN ATAU BELANJA ONLINE DARI LUAR NEGERI ? SUDAH TAHU ATURANNYA BELUM ?

Jangan lupa lapor
jika bawa uang tunai atau
instrumen pembayaran lain
sejumlah **100 juta rupiah**
atau lebih !

Pembawaan barang dari
luar negeri
yang harganya
lebih dari **250 USD**
wajib membayar
Pajak dan Bea Masuk



Hati-hati
apabila
dititipi barang
oleh orang lain,
bisa jadi itu
NARKOBA lho..

**YUK KITA BANGUN DAN LINDUNGI NEGERI !!
UNTUK INDONESIA MAKIN BAIK**

Belanja online
dari luar negeri
di atas **FOB 100 USD**
juga kena Pajak dan
Bea Masuk ya..

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI



BEA CUKAI
Makin Baik
HIMPUNAN & MELAYANI



**DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI**

www.beacukai.go.id

f i t
@beacukaiRI

JANGAN TERTIPU DENGAN YANG **PALSU**



PITA CUKAI PALSU

Pita cukai **TIDAK RESMI** dari Pemerintah, sebagai tanda pelunasan cukai hasil tembakau (rokok)
(melanggar UU No.39 / 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 / 1995 tentang CUKAI)

**Bila Anda menemukan rokok dengan pita cukai yang terindikasi PALSU
Segera Laporkan ke KANTOR BEA CUKAI terdekat atau hubungi**

Contact Center BRAVO BEA CUKAI **1500 225**

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh

